



SKRIPSI

**PERAN *CONTROLLING AGENCY* KOMITE SEKOLAH DALAM
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR**

HESTI NURLITA

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2019**



**PERAN *CONTROLLING AGENCY* KOMITE SEKOLAH DALAM
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Administrasi Pendidikan
Strata Satu Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Makassar

Oleh

**HESTI NURLITA
1543040014**

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2019**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Jalan : Tamalate 1 Tdung, Makassar KP. 90222
Telepon : 884457, Fax. (0411) 884457
Laman: www.fip.unm.ac.id; E-mail: fip@unm.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Di SMP Negeri 33 Makassar”**

Nama : Hesti Nurlita
NIM : 154 304 0014
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diteliti, serta dilaksanakan ujian Skripsi pada hari Senin, 25 Juli 2019 dan dinyatakan **LULUS**.

Makassar, 29 Juli 2019

Pembimbing I:

Drs. M. Bachtiar, M.Si
NIP. 19561231 198503 1 001

Pembimbing II:

Sumartin Mus, S.Pd., M.Pd
NIP. 19831202 201012 1 008

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan



JURUSAN AP.
Dr. Ed. Faridah, S.T., M.Sc
NIP. 19740224 200501 2 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222
Telepon: 884457, Fax. (0411) 884457
Laman: www.fip.unm.ac.id; E-mail: fip@unm.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi atas Nama Hesti Nurlita, Nim: 1543040014, Judul Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di SMP Negeri 33 Makassar diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar dengan SK Dekan No. 5254/UN36.4/PP/2019 tanggal 17 Juli 2019, dan telah di ujiankan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Pendidikan serta telah dinyatakan **LULUS**.

Makassar, Juli 2019

Disahkan oleh,
Dekan FIP UNM

Dr. Abdul Saman, M. Si. Kons.
NIP. 1972081720021121001

Panitia Ujian:

- | | | |
|------------------|-----------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Ansar, M.Si | (.....) |
| 2. Sekretaris | : Dr. Wahira, M.Pd | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : Drs. M. Bachtiar, M.Si | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : Sumarlin Mus, S.Pd.,M.Pd | (.....) |
| 5. Penguji I | : Dr. Andi Nurochmah, M.Pd | (.....) |
| 6. Penguji II | : Dr. Kartini Marzuki, M.Si | (.....) |

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Nurlita
Nim : 1543040014
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul : Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah Dalam
Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi
Di SMP Negeri 33 Di Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 28 Mei 2019

Yang membuat pernyataan

Hesti Nurlita
Nim. 1543040014

MOTO DAN PERUNTUKKAN

**PERCAYA DIRILAH TERHADAP PROSES YANG DILALUI MESKI
BERBEDA PADA DASARNYA APA YANG DITABUR ITU YANG AKAN
KITA TUAI
(Hesti Nurlita, 2019)**

*Kuperuntukkan karya sederhana ini sebagai wujud terima kasihku terhadap keras
Orang tuaku, Sudaraku dan Keluarga besarku yang begitu mencintai serta
merawatku dengan tulus, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak
atas kesederhanaan hidup yang penuh cinta kasih dan kebahagiaan.*

ABSTRAK

HESTI NURLITA, 2019. Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di SMP Negeri 33 Makassar. Skripsi dibimbing oleh Drs. M. Bachtiar, M.Si dan Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd. Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini mengkaji tentang Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah di SMP Negeri 33 Makassar yang berfokus pada “Bagaimana peran *controlling agency* komite sekolah di SMP Negeri 33 Makassar?”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Pengurus Komite diantaranya Ketua Komite, Wakil/Ketua Komite, Sekretaris, Anggota Komite dan Kepala Sekolah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode (1) reduksi data (*data reduction*);(2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Berdasarkan hasil analisis data dan hasil penelitian tentang Peran *controlling agency* komite sekolah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di SMP Negeri 33 Makassar dapat di simpulkan bahwa: 1).Akuntabilitas, komite sekolah melakukan pendampingan pada setiap kegiatan sekolah agar dapat memudahkan sekolah, membantunya dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi, serta dalam kegiatan pelaporan komite sekolah ikut bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya baik terkait kinerja sekolah, mutu sekolah, sumberdaya sekolah dan output sekolah. 2) Transparansi, komite sekolah mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan sekolah, ikut serta dalam setiap rapat sekolah yang membahas tentang penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS), dan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), membantu sekolah dalam menggalang partisipasi masyarakat baik berupa ide/gagasan hingga sampai pada bantuan yang berbentuk *financial*.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah AWT. yang senantiasa penulis panjatkan, karena berkat Rahmat Dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul “Peran *controlling agency* komite sekolah di SMP Negeri 33 Makassar”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.

Dalam penyelesaian karya ini, ada begitu banyak hambatan yang dihadapi oleh penulis namun semua itu dapat teratasi berkat Ridho Allah SWT. Serta do’a, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak yang begitu banyak mendukung. Oleh karena itu, dengan penuh hormat penulis menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Bapak Bakri dan Ibunda tercinta Hamsina, serta kepada Drs. M. Bachtiar, M.Si dan Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd. masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan arahan, petunjuk dan motivasi kepada penulis mulai dari penyusunan usulan penelitian hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya ucapan yang sama dihaturkan kepada:

1. Prof Dr. H. Husain Syam, M. TP selaku Rektor Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Makassar.

2. Dr. Abdul Saman, M.Si, Kons sebagai Dekan FIP UNM; Dr. Mustafa, M.Si sebagai WD I ; Dr. Pattaufi, S.Pd, M.Si sebagai WD II dan Dr. Ansar, M.Si WD III FIP UNM, yang telah memberikan layanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan selama proses pendidikan dan penyelesaian studi.
3. Dr. Ed Farida, ST, M.Sc dan Dr. Wahira, M.Pd sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM, yang dengan penuh perhatian memberikan bimbingan dan memfasilitasi penulis selama proses perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya Jurusan Administrasi Pendidikan yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan program Sarjana
5. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Andi Mardiani Maddusila, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 33 Makassar yang telah memberikan izin penelitian dan kepada Bapak Drs. A. Ramli Pangki, S.I.P, Drs. Suardi Hakim serta jajaran pengurus komite sekolah di SMP Negeri 33 Makassar terima kasih telah banyak meluangkan waktunya untuk bekerja sama dalam penelitian ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Bakri dan Ibunda Hamsina terima kasih atas kasih sayangnya yang begitu tulus disertai banyaknya didikan yang begitu berharga, bersama do'a dan harapan yang selalu menuntu penulis agar selalu dalam ketaatan dan kesuksesan.
7. Kepada saudaraku satu-satunya Musleydi Bakri, S.E beserta Istrinya Nurwahidah yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan studi.

8. Terima kasih pula kepada Sahabatku Wahyuni Majid, Amd.Kg, Widya, Amd.Keb., Febrianty dan Suci Parandari yang selalu memberikan bantuan dan semangat agar tidak pantang menyerah.
9. Teman-teman seperjuanganku Nurfadillah Said, Nur Asiah, Huznul Hatimah, Karmila, Nurul Hasanah, Erni Sofiani, Sri Wahyuni, Dian Febrianty, Irda Amir dan Nurcahyani. Terima kasih yang tak terhingga untuk selama ini semoga kita semua dapat sukses dalam meraih cita-cita kita masing-masing, Amin.
10. Terima kasih pula atas bantuannya terhadap orang-orang yang tidak mungkin dapat disebutkan namanya satu-persatu yang berada di Jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 2015 Fakultas Ilmu Pendidikan, semuanya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kerja sama yang baik diantara kita semua.

Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi bagi pembaca, semoga kebaikan dan keikhlasan serta bantuan dari semua pihak dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin

Makassar, 28 Mei 2019

HESTI NURLITA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTO & PERUNTUKKAN	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Peran Controlling Agency Komite Sekolah	10
a. Pengertian Controlling Agency Komite Sekolah	10
b. Fungsi Peran Controlling Agency Komite Sekolah	13

c. Indikator Kinerja Peran Controlling Agency Komite Sekolah	16
2. Komite Sekolah	23
a. Pengertian Komite Sekolah	23
b. Fungsi Komite Sekolah	24
c. Tujuan Komite Sekolah	27
d. Organisasi Komite Sekolah	28
B. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Kehadiran Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Prosedur Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data	39
G. Pengecekan Keabsahan Data	40
H. Tahap-tahap Penelitian	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
2. Profil Sekolah	43
3. Visi dan Misi Sekolah	44
4. Fasilitas Sekolah	45
5. Penyajian Analisis Data	49

6. Hasil Penelitian Peran <i>Controlling Agency</i> Komite Sekolah di SMP Negeri 33 Makassar	49
a. Akuntabilitas	50
b. Transparansi	68
B. Pembahasan Hasil Penelitian Peran <i>Controlling Agency</i> Komite Sekolah di SMP Negeri 33 Makassar	80
a. Akuntabilitas	80
b. Transparansi	85
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94
PERSURATAN	136
RIWAYAT HIDUP	137

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
3.1	Skema Kerangka Konseptual	33

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL	HALAMAN
4.1	Fasilitas Data ruang kelas SMP Negeri 33 Makassar	45
4.2	Fasilitas Data Ruang Lain SMP Negeri 33 Makassar	46
4.3	Keadaan Guru dan Pegawai di SMP Negeri 33 Makassar	47
4.4	Data Siswa 3 (Tiga) Tahun Terakhir	47
4.5	Pengurus Komite di SMP Negeri 33 Makassar	48

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Hal
1	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	95
2	Pedoman Wawancara	96
3	Pedoman Observasi	102
4	Matriks Analisis Data	105
5	Dokumentasi	123
6	Persuratan	136
7	Riwayat Hidup	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam peningkatan mutu layanan pendidikan memerlukan kemampuan manajerial yang efektif sebab dikarenakan sukses atau tidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dan komite sekolah dalam mengelola setiap komponen sekolah. Kemampuan kepala sekolah dan mitranya tersebut berkaitan langsung dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap manajemen dan kepemimpinan yang diterapkan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berhasil tidaknya suatu sekolah dalam mencapai tujuan serta mewujudkan visi dan misi sekolah terletak pada bagaimana manajemen, khususnya dalam menggerakkan dan memperdayakan berbagai komponen sekolah.

Dalam prosesnya interaksi antara kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga administrasi, dan masyarakat memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam penyesuaian berbagai aktivitas sekolah dengan tuntutan era globalisasi. Semua ini sangat dituntut agar adanya kompetensi dan profesionalitas dari pihak-pihak yang terkait didalamnya, agar memungkinkan terciptanya interaksi berkualitas yang merujuk pada pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Untuk memperoleh pendidikan yang bermutu maka dalam pelaksanaannya pula harus berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

“Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Praktiknya untuk dapat mengamalkan undang-undang mengenai tujuan pendidikan nasional maka sekiranya kepala sekolah, guru, serta masyarakat sebagai pelaku utama idealnya harus bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dapat dipahami bersama bahwa, segala ketentuan yang berlaku untuk dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong bersama kepala sekolah, guru, dan masyarakat orang tua wali peserta didik berdasarkan amanat dari Undang-undang Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Oleh karena itu, adanya pembentukan komite pada setiap lembaga sekolah diharapkan mampu mengupayakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah untuk mewujudkan aspirasinya.

Menarik untuk diamati, bahwa setiap jenjang sekolah memiliki lembaga komite sekolah dalam rangka melakukan kerjasama dengan sekolah yang bertujuan, agar keberadaan komite sekolah menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya sekolah efektif untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut, dapat di wujudkan apabila kepala sekolah mampu menggandeng komite sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan serta menilai program-program sekolah. Sebagai konsekuensi perluasan makna, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi nama komite sekolah. Sebagaimana mestinya yang dikemukakan oleh Irjen Kemendikbud yang menyampaikan bahwa:

Terkait dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 intinya itu untuk memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tugas seperti apa Komite Sekolah. melalui regulasi itu, Kemendikbud mewajibkan komite sekolah meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan dengan prinsip gotong royong, jelas, transparan dan akuntabel. (<https://m.republika.co.id>)

Hal ini sejalan dengan Walikota Makassar Danny Pomanto menjelaskan bahwa untuk memenuhi amanat undang-undang pendidikan yang memperbolehkan adanya partisipasi pihak luar sekolah dalam hal ini yang dimaksud adalah komite sekolah untuk ikut berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan dan selain itu, untuk kepentingan pengajaran sekolah dimasing-masing lembaga satuan pendidikan dimana memberikan jaminan bagi komite sekolah untuk memberdayakan sumberdayanya. (<http://m.tribunnews.com>).

Selain dari pada itu, melihat dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Negeri 33 Makassar telah terakreditasi A. (<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah>). Berdasarkan dari hasil study pendahuluan yang dilakukan pada Tanggal 28-29 Agustus 2018, peneliti melakukan wawancara kepada KS selaku Wakil Komite Sekolah menjelaskan bahwa:

“Keikutsertaan komite sekolah menjadi nilai tambah terhadap manajemen sekolah karena kita melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan pendidikan, membantu sekolah menyiapkan kebutuhan pendidikan bersama para pemerhati pendidikan disekolah dalam hal ini melakukan swadaya bersama orang tua/wali siswa, adanya keterlibatan komite dalam perencanaan dan pemantauan pelaksanaan program sekolah, adanya transparansi penggunaan anggaran dana, hingga sampai pada pemantauan terhadap proses belajar mengajar serta penilaian angka partisipasi sekolah seperti pemeriksaan nilai kelulusan peserta didik selain itu pula setiap permasalahan yang ada sekolah dan komite selalu mencari solusi bersama-sama melalui rapat pleno untuk menemukan jalan terbaik yang dapat diterapkan”.

Dari pencapaian sekolah beserta penjelasan wakil komite sekolah dapat dikatakan pihak sekolah telah melakukan kerjasama yang baik dalam mewujudkan adanya akuntabilitas dan transparansi di SMP Negeri 33 Makassar. Berdasarkan hal tersebut, wawancara dari AM selaku Kepala sekolah juga menyatakan bahwa:

“Kami dengan komite sekolah itu, memiliki hubungan baik dalam bekerjasama mengelolah manajemen sekolah. Karena, segala sesuatu tentang sekolah harus adanya sepengetahuan dari komite seperti pertanggung jawaban sekolah terhadap program sekolah, mutu sekolah hingga sampai pada lulusan ataupun alumni yang telah dihasilkan oleh sekolah. Jadi, ada pengawasan ataupun pengontrolan yang dilakukan komite sekolah melalui setiap pelaksanaan rapat sekolah dan pelaksanaan kegiatan sekolah”.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah diperoleh peneliti, melihat kembali bahwa dalam Kepmendiknas Nomor:004/U/2002 Tentang Peran dan Fungsi Komite Sekolah ada beberapa peran yang harus dilakukan komite sekolah yaitu:

- 1) Pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- 2) Pendukung (*Supporting Agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Pengontrol (*Controlling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
- 4) Mediator antara Pemerintah (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) dengan masyarakat.

Dari uraian tentang peran dan fungsi komite sekolah dalam Kepmendiknas Nomor:004/U/2002 yang terdapat pada poin ke tiga bahwa, peran *controlling agency* dilaksanakan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Dimana terlihat sejalan, dengan hasil studi pendahuluan bahwa komite melakukan pengontrolan terhadap penyelenggaraan program sekolah serta adanya keaktifan pengurus komite sekolah dalam setiap pengadaaan rapat hingga segala sesuatu tentang sekolah harus adanya sepengetahuan dari komite seperti pertanggung jawaban sekolah terhadap program sekolah, mutu sekolah hingga sampai pada lulusan ataupun alumni yang telah dihasilkan oleh sekolah. Oleh karena itu sejalan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengamati peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*Controlling Agency*). Dimana dalam hal ini, untuk mengkaji lebih dalam bagaimana keterlibatan komite sekolah untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dan transparansi di SMP Negeri 33 Makassar. Selain dari pada itu, tugas komite sekolah di dasarkan pula terhadap prinsip gotong royong bersama

kepala sekolah, guru, dan masyarakat orang/tua wali peserta yang diamanatkan dalam Undang-undang baru dari Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, agar penulis dapat lebih memperkaya paradigma teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Dalam penelitian Sirajuddin (2016), yang mengkaji tentang peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, mutu pendidikan agama Islam di SDN 124 paroto dikatakan cukup baik, itu dapat dilihat dari segi input, proses, dan outputnya. Kedua, peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di SDN 124 Paroto, meliputi: 1) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): Komite SDN 124 Paroto sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah. 2) sebagai pendukung (*supporting agency*) peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama islam di SDN 124 Paroto, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite ikut membantu dan menunjang sarana dan prasarana sekolah. 3) sebagai pengotrol (*controlling agency*) komite sekolah di SDN 124 Paroto melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah. 4) sebagai mediator (*executive*) komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat

memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah.

Selain itu, Fauziah (2018) dalam penelitiannya membahas tentang Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMPN 03 Cisauk dengan penelitian yang mendeskripsikan bahwa peran komite sekolah di SMPN 03 Cisauk dalam meningkatkan mutu pendidikan Cisauk cukup optimal didalam beberapa peran seperti peran komite sebagai pemberi pertimbangan, dan sebagai mediator. Namun, sebagai badan pengontrol dan pendukung perannya belum optimal. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, dan sebagai mediator sudah optimal dapat dilihat dari cukup aktifnya komite dalam mendukung program-program yang ada disekolah baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

Sedangkan dalam penelitian Emelda (2018), Berdasarkan hasil penelitiannya mengenai peran komite sekolah sebagai Pengontrol Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Gugus SD, dapat di simpulkan bahwa komite sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai pengontrol masih belum maksimal baik dalam transparansi maupun akuntabilitas sebagai pengontrol. Dimana komite sebagai pengontrol transparansi masih belum maksimal dalam hal: (1). Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan; (2). Penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS); (3). Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Begitupun keterlibatannya dalam mengontrol akuntabilitas yang diantaranya adalah: (1). Kinerja sekolah; (2). Mutu sekolah; (3). Sumberdaya sekolah; (4). Output pendidikan. maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah di gugus SD Lambada Klieng

masih belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai pengontrol penyelenggaraan pendidikan terhadap satuan gugus di SD.

Berdasarkan dari peneliti terdahulu maka yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji tentang Peran *controlling agency* komite sekolah di SMP Negeri 33 Makassar untuk mengamati sejauh mana peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian yang telah diuraikan di atas maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana peran *controlling agency* komite sekolah dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di SMP Negeri 33 Makassar ?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran *controlling agency* komite sekolah dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di SMP Negeri 33 Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkait dengan peran *controlling agency* komite sekolah di SMP Negeri 33 Makassar.
 - b. Menambah wawasan keilmuan Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah, dan Manajemen Mutu Terpadu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Sebagai bahan masukan kepala sekolah untuk terus meningkatkan kerja sama dengan komite sekolah guna dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

b. Bagi Komite

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai peran *controlling agency* komite sekolah dalam mendukung manajemen sekolah.

c. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman terhadap tugas dan fungsi komite sekolah.

d. Bagi Universitas Negeri Makassar

Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian bagi mahasiswa Universitas Negeri Makassar khususnya mahasiswa program studi Administrasi Pendidikan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tinjauan Pustaka

1. Peran *Controlling Agency* (Pengontrol) Komite Sekolah

a. Pengertian *Controlling Agency* komite sekolah

Komite Sekolah dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada sekolah, apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program yang dilakukan sekolah. Dalam pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana Komite Sekolah melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut.

Menurut Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2002 Nomor 044 tentang peran dan fungsi Komite sekolah menjelaskan bahwa ada beberapa peran yang harus dilakukan komite sekolah yaitu:

- 1) Pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- 2) Pendukung (*Supporting Agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Pengontrol (*Controlling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
- 4) Mediator antara Pemerintah (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Legislatif*) dengan masyarakat.

Dari uraian tentang peran dan fungsi komite sekolah dalam Kepmendiknas Nomor:004/U/2002 yang terdapat pada poin ke tiga bahwa, peran *controlling agency* dilaksanakan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Adapun, pendapat Noris (2007) menyatakan bahwa komite melakukan pengontrolan dalam melaksanakan pendidikan melalui hasil belajar siswa. Pengontrolan penjadwalan program dan anggaran. Komite sekolah dalam hal ini juga, mengontrol partisipasi *stakeholder* pendidikan dalam pelaksanaan program. Pengontrolan yang dilakukan komite atau dengan komite datang ke sekolah langsung, sehingga bila ada yang tidak sesuai atau dianggap kurang tepat maka pihak komite memberikan saran atau kritikan pada sekolah untuk di musyawarakan bersama melalui rapat-rapat yang diselenggarakan di sekolah.

Selain itu, Haryanto,dkk (2008: 82) mengungkapkan bahwa komite sekolah memiliki peran sebagai *controlling agency*, badan yang melaksanakan pengawasan sosial kepada sekolah. Pengawasan ini, tidak sebagai pengawasan institusional sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga maupun badan pengawasan seperti inspektorat, atau Badan Pemeriksa Keuangan, maupun Badan Pengawasan Fungsional lainnya. Melainkan, hanya sebagai pengawasan sosial yang dilakukan dengan lebih memiliki implikasi sosial, dan lebih dilaksanakan secara preventif. Seperti ketika, sekolah menyusun RAPBS, atau ketika sekolah menyusun laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Hasbullah (2006:97) sebagai pengontrol komite sekolah memiliki tanggung jawab dalam hal: 1. Transparan, 2. Akuntabilitas. Sebagai

penyelenggara pendidikan, yang berperan sebagai pengontrol Komite sekolah sekiranya melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pengontrol. Dalam rangka mewujudkan, kondisi yang transparan dan adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan baik dalam proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah.

Selain dari pada itu, Siagian (2000) juga mendefinisikan bahwa pengawasan/kontrol sebagai keseluruhan upaya pengamatan kegiatan operasional, guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan, untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dalam arti bukan sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 tertulis bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”. Maka dari itu dapat dipahami bahwa peran komite sekolah sebagai *Controlling Agency* (Pengontrol) dimaksudkan dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan serta terlaksananya pemantauan output atau keluaran pendidikan di lembaga satuan pendidikan hal ini sejalan dengan Peraturan Kepmendiknas Nomor:044/U/2002 tentang Peran dan Fungsi Komite.

Melaksanakan peran sebagai pengontrol dalam kegiatan di sekolah sebaiknya bertujuan untuk membangun adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah

dengan komite sekolah agar membuat pihak sekolah tidak merasa diawasi atau dimonitor, tetapi peran komite sebagai badan pengontrol sebaiknya lebih kepada melaksanakan pendampingan dan penyampaian komunikasi yang cukup intens. Akan tetapi yang dimaksudkan dalam kerjasama dengan alumni, komite sekolah membutuhkan waktu agar dapat menjalin komunikasi dengan pihak alumni sehingga dapat mendukung program-program sekolah.

Semua kegiatan ini, dapat menjadi agenda dari organisasi Komite Sekolah karena kegiatan-kegiatan tersebut bila direncanakan dengan baik akan sangat berguna untuk mempererat hubungan orang tua murid dengan sekolah. Dengan demikian, orang tua peserta didik akan bekerja sama dengan guru dalam memacu pendidikan anak-anak mereka untuk mempererat hubungan orang tua murid dengan sekolah. Dengan demikian, orang tua peserta didik akan bekerja sama dengan guru dalam memacu pendidikan anak-anak mereka untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tetapi sebelumnya, agar hubungan kerja sama dapat membuahkan hasil, pihak sekolah dan orang tua harus terlebih dahulu menanamkan rasa saling percaya dan saling jujur dalam bertindak. Bila hal ini tidak tertanamkan pada kedua belah pihak, maka kerja sama tersebut tidak akan membuahkan hasil yang efektif dalam implementasi peran komite sekolah sebagai pengontrol.

b. Fungsi peran *Controlling Agency* Komite Sekolah

Komite sekolah sejalan dengan diluncurkannya, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), diharapkan mampu mendorong efektifitas kemampuan manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah yang Desentralisasi dan bersifat Demokratis.

Dapat membantu, adanya pengontrolan di lembaga satuan pendidikan secara berkala melalui adanya peran komite sekolah sebagai *controlling Agency* yang dimana dalam peranannya terkait adanya transparansi, akuntabilitas hingga sampai pada pemantauan output sekolah.

Dalam penelitian Setiyono (2015) dikutip dari Slamet (2005:6) menjelaskan bahwa:

“Tujuan utama transparansi dan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya, yang dimana penyelenggaraannya harus memahami bahwa sekolah harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. Sebab pada dasarnya, penilaian kinerja sekolah didasarkan pada kepuasan publik”.

Berdasarkan hal tersebut, peran pengontrol difungsikan agar dapat menciptakan kondisi yang transparan menyeleksi penentuan kriteria yang harus bersifat terbuka serta dapat diketahui publik, adanya akuntabilitas penyelenggaraan yang dapat dipertanggung jawabkan hingga sampai pada pemantauan output sekolah dalam rangka sebagai wujud dari kontribusi komite sebagai *controlling agency*.

Dimana hal ini, (Emelda, 2018) dalam penelitiannya menguraikan bahwa sebagai pengontrol komite sekolah berperan dalam akuntabilitas serta transparansi kegiatan sekolah yang diantaranya adalah:

- 1) Akuntabilitas
 - (a) Kinerja sekolah;
 - (b) Mutu sekolah
 - (c) Sumber daya sekolah
 - (d) Output pendidikan.
- 2) Transparansi
 - (a) Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan
 - (b) Penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS), dan
 - (c) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Berdasarkan penjabaran ruang lingkup peran pengontrol komite sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam akuntabilitas peran komite merupakan pengontrolan pertanggung jawaban. Terhadap hal-hal yang berkaitan, tentang kinerja sekolah, mutu sekolah, pemberdayaan sumber daya sekolah, hingga sampai pemantauan output sekolah. sedangkan dalam hal mewujudkan keterbukaaan lembaga sekolah komite diharapkan mampu ikut serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS), dan rencana anggran pendapatan dan belanja sekolah.

Sejalan dengan hal tersebut, (Baedowi, 2015) menjelaskan bahwa didalam mutu pendidikan, perlu adanya pengembangan mutu agar memastikan bahwa mutu suatu sekolah berjalan dengan baik dan semestinya. Untuk itu, maka perlu diadakannya tim pengembang mutu untuk memastikan tercapainya tujuan sekolah. Tim Pengembang mutu akan mengkaji secara cermat setiap lingkup dengan rinci diantaranya ialah mutu pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan kemampuan profesional, dan dampingan di luar sekolah. Mutu pembelajaran terdiri dari tiga unsur yaitu guru, murid serta kurikulum. Sedangkan pengelolaan sekolah bertujuan untuk melihat kemampuan sekolah untuk merealisasikan visi dan misi kedalam kegiatan-kegiatan sekolah. Pengembangan kemampuan profesional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan setiap sumber daya yang ada disekolah. Dampingan diluar sekolah bertujuan untuk menumbuhkan minat dan bakat siswa.

c. Indikator Kinerja Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah

Berdasarkan penjabaran ruang lingkup peran pengontrol komite sekolah dalam penelitian (Emelda, 2018) mengutip bahwa sebagai pengontrol komite sekolah berperan dalam akuntabilitas serta transparansi kegiatan sekolah yang diuraikan sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Dalam mengkaji lebih dalam peran pengontrol komite sekolah, terlebih dahulu harus dipahami bahwa ruang lingkup *controlling agency* salah satunya adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggung jawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu.

Selain itu, menurut para ahli (Mardiasmo, 2006) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun, kegagalan dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Adapun indikator akuntabilitas *controlling agency* yang diantaranya adalah sebagai berikut:

(a) Kinerja sekolah;

Dalam (Afifah, 2016) Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah. Penilaian kinerja dapat meliputi guru, kepala sekolah, dan staff (tenaga administrasi sekolah) merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas

sekolah/madrasah. Kompetensi tersebut termasuk dalam dimensi kompetensi evaluasi pendidikan.

Hal ini dijelaskan Lugtyastyono (2014) dalam tulisannya mengatakan bahwa Standar pendidik dan kependidikan merupakan salah satu unsur strategis dalam peningkatan mutu. Fokus utamanya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan profesional kepala sekolah/madrasah secara terencana melalui proses perbaikan mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perkembangan mutu perlu dipetakan secara berkala sehingga terwujud profil kepala sekolah berbasis data hasil pengukuran.

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002 terkait fungsi komite sekolah mengatakan bahwa komite sekolah dapat “Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kinerja tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan”.

Berasarkan penjelasan Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002, dapat memberikan gambaran bahwa dalam menjalankan peran *controlling agency* komite sekolah dalam akuntabilitas kinerja sekolah dapat dilakukan dengan memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kinerja tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

(b) Mutu sekolah

Terkait mutu sekolah (Utomo, 2017) menjelaskan bahwa Mutu dalam konteks (hasil) pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil pendidikan tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olahraga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Selain itu, peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.

(c) Sumber daya sekolah

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 tertera bahwa “Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga , sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan”.

Selain dari pada itu, dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa “Sumber daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana”. Adapun yang dikemukakan oleh (Hasbullah, 2006) keuangan dan pembiayaan pula merupakan salah satu sumberdaya yang secara garis besar langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut, lebih terasa dalam implementasi MBS, yang menurut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Mulyasa (2011) menjelaskan pula bahwa sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu

- 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun keduanya, yang bersifat umum atau khusus bagi kepentingan pendidikan;
- 2) Orang tua atau peserta didik;
- 3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.

(d) Output pendidikan

Pengawasan terhadap kebijakan program dan keluaran pendidikan dapat dilakukan oleh komite sekolah untuk membantu sekolah dimana dalam hal ini berkaitan dengan perannya sebagai *controlling agency*. Berknaan dengan output pendidikan maka dalam hal ini berkaitan dengan siswa yang dimana (Mulyadi, 2018)

dalam penelitiannya mengungkap ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan antara lain yaitu:

- 1) Siswa harus diperhatiakn sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka.
- 2) Keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperhatikan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal.
- 3) Pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan.
- 4) Pengembangan potensi siswa hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik.

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah yang berkaitan dengan mutu output sekolah dapat dijelaskan bahwa, output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, (Rohiat, 2008) dalam bukunya menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam:

- 1) Prestasi akademik, berupa nilai ulangan harian, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi, hasil Ebtanas, karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain peserta didik;
- 2) Prestasi non-akademik, seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Oleh karena itu, Output Pendidikan sangat bergantung pada proses-proses yang dijalankan oleh suatu lembaga pendidikan sehingga dapat menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan. (Danim, 2006) menyatakan bahwa “hasil (*output*) pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler”.

2) Transparansi

Secara umum, transparansi dapat dipahami sebagai sesuatu hal yang bersifat terbuka. Hal ini, didasarkan pada pendapat beberapa ahli yang salah satunya Lalolo (2003:13) mengemukakan pendapatnya bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Berikut, ada pula indikator transparansi dalam *controlling agency* komite sekolah diantaranya:

(a) Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di sekolah, diharapkan komite dapat berpartisipasi mendorong masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam mewujudkan program dan kegiatan yang ada di sekolah, baik itu program jangka

pendek, menengah dan jangka panjang. Terlaksananya program tahunan, dapat dikatakan berhasil bila program kerja tahunan yang disusun dan telah mendapatkan pengesahan, dari kepala sekolah bahwa program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai target yang ingin dicapai.

Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Jakarta Pusat (<https://dpij.wordpress.com>), menguraikan bahwa kinerja Komite Sekolah terkait dengan perannya sebagai badan pengontrol (*Controlling Agency*). Sejalan dengan pelaksanaannya, yang didasarkan pada fungsi manajemen pendidikan yang antara lain: Mengontrol pelaksanaan program sekolah, yang mencakup tentang hal ini adalah mengontrol organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, memantau sumber daya pelaksana program, dan memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.

(b) Penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS)

Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah yaitu dengan mengontrol proses pengambilan keputusan, mengontrol kualitas kebijakan di sekolah, mengontrol proses perencanaan pendidikan, melakukan pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah serta pengawasan terhadap kualitas program sekolah.

Sejalan dengan hal tersebut, (Muhi, 2012) berpendapat bahwa Keterlibatan komite sekolah dapat diupayakan tidak hanya dalam bentuk dana yang dapat diserap, tetapi juga kepedulian dan perhatian/rapat dan mematuhi peraturan yang ditertibkan

oleh sekolah. Termasuk dalam hal ini, keikutsertaan komite sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Adanya keterlibatan pengurus komite dapat dinilai dari kehadiran rapat pengurus, dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang memerlukan kehadiran mereka, dan keaktifan mereka dalam menjalankan tugas.

(c) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Banyaknya potensi orang tua siswa atau masyarakat dapat digali dalam bentuk uang, material, maupun sumbangan pemikiran dan tenaga. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam usaha menghimpun potensi tersebut komite sekolah harus bersikap fleksibel dan tidak memaksa. (Agustini, 2013) Dengan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat.

2. Komite Sekolah

a. Pengertian komite sekolah

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah pengertian ini dikutip dalam Kepmendiknas Nomor:044/U/2002.

Kemudian Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Komite sekolah menjelaskan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang

beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Dalam pengertian lain, Djam'an Satori menyebutkan bahwa komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah (Mulyono,2014:258).

Berdasarkan pengertian yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan, mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta masyarakat yang peduli pendidikan sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan kepentingan lembaga sekolah.

b. Fungsi Komite Sekolah

Selama ini seperti yang diketahui bersama, di zaman modern ini sekolah dituntut untuk dapat memberikan yang terbaik bagi putra-putri generasi penerus bangsa dimana orang tua yang menyolahkan anaknya sangat mempercayakan sepenuhnya pendidikan terbaik dapat diperoleh pada lembaga satuan pendidikan yaitu sekolah yang dalam pengelolaannya membutuhkan perhatian penuh dari *stakeholder* yang berwenang salah satunya adalah komite sekolah.

Mulyasa (2011: 128-129) mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi komite sekolah yang diantaranya adalah:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di sekolah;
- 2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (Perorangan/Organisasi/Dunia Usaha/Dunia Industri) dan Pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 3) Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Sekolah mengenai : Kebijakan dan Program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBM), Kriteria Kinerja Sekolah, Kriteria Tenaga Kependidikan, Kriteria Fasilitas Pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 6) Menggalang dan masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah.

Komite sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarki dengan lembaga pemerintah. Komite sekolah dapat terdiri dari setiap satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada dalam pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan, atau karena pertimbangan yang lain.

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya wadah organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah dibentuk yang dibentuk dapat

dikembangkan secara khas dan berakar dari Budaya, Demografis, Ekologi, Nilai Kesepakatan, serta Kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofi masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada Penggunaan (*Client Model*), berbagai Kewenangan (*Power Sharing and Advocacy*), dan Kemitraan (*Partnership Model*), yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan (SK Mendiknas Nomor:044/U/2002).

Adapun Fungsi Komite sekolah menurut Permendikbud Nomor 75 Pasal 3 Tahun 2016 tentang menegaskan bahwa komite sekolah memiliki fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - a. Kebijakan dan program sekolah;
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - c. Kriteria kinerja sekolah;
 - d. Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
 - e. Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
- 2) Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- 3) Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- 4) Menindaklanjuti kelurahan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite sekolah atas kinerja sekolah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka komite sekolah berfungsi sebagai untuk mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.

c. Tujuan Komite Sekolah

Komite sekolah sangat dibutuhkan perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di sekolah, dan fokus kajiannya adalah bagaimana memberikan kontribusinya terhadap sekolah yang menggandengnya, karena kualitas menjadi parameter, maka usaha perbaikan, pengembangan, dan percepatan secara konsisten harus dapat di tingkatkan. Keberadaan komite sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong agar terbentuknya sekolah yang efektif berlandaskan terciptanya kondisi yang transparan, akuntabel, demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Sejalan dengan hal tersebut Menurut Mulyasa (2011:128) tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah sebagai berikut:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Sesuai yang dikemukakan terkait dengan tujuan dibentuknya komite sekolah dapat di simpulkan bahwa tujuan komite sekolah diperuntukkan agar dapat menjadi

wadah kerja sama yang menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam rangka agar terciptanya suasana ataupun kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Adapun menurut *Departement of Education, Training and Employment* dalam (Mustadi, 2016) terdapat lima elemen gambaran kerja sama orang tua dan sekolah di antaranya:

- 1) Komunitas yang efektif;
- 2) Membangun komunitas belajar;
- 3) Menjalin hubungan dengan sekolah dan masyarakat luas;
- 4) Mengambil keputusan bersama;
- 5) Serta turut berpartisipasi mendukung dan membantu berjalannya program.

Berdasarkan dari tujuan dibentuknya komite sekolah maka komponen utama yang terdapat di dalamnya adalah bagaimana pihak sekolah, Komite dan orang tua/wali dapat menjalin kerja sama yang baik dengan membangun komunikasi yang efektif, membentuk komunitas belajar sebagai wujud peningkatan kualitas belajar peserta didik, adanya jalinan hubungan antara sekolah dan masyarakat luas, mengambil keputusan secara bersama hingga turut berpartisipasi mendukung dan membantu pelaksanaan program sekolah.

d. Organisasi Komite sekolah

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah. komite sekolah berkedudukan di sekolah, dan setiap sekolah

dapat mempunyai satu komite sekolah atau dapat bergabung dengan sekolah lain dalam mendirikan satu lembaga komite. Komite sekolah bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan yang hirarki dengan lembaga pemerintahan, meskipun demikian di dalam praktiknya banyak sekali komite sekolah yang tidak mampu mandiri terutama dalam pencarian dana sehingga hanya mengandalkan dan pemerintah.

Komite sekolah sebagai lembaga mandiri memiliki batasan-batasan tersendiri dalam pembentukan kepengurusan anggota komite seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa (2011:1290130) yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan komite sekolah
 - (a) unsur masyarakat dapat berhasil dari: orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/industri; organisasi profesi tenaga kependidikan; wali alumni; wakil peserta didik;
 - (b) Unsur komite guru; yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite sekolah (maksimal 3 orang);
 - (c) Anggota komite sekolah, sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang, dan jumlahnya gasal.
- 2) Kepengurusan Komite Sekolah
 - a) Pengurus, sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - b) Pengurus dipilih dari oleh anggota;
 - c) Ketua bukan berasal dari Kepala Sekolah.
- 3) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
 - (a) Komite sekolah wajib memiliki AD dan ART;
 - (b) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud, sekurang-kurangnya memuat: nama dan tempat kedudukan, dasar tujuan dan kegiatan, keanggotaan dan kepengurusan, hak kewajiban anggota dan pengurus, keuangan, mekanisme kerja dan rapat-rapat, perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

Dalam paradigma baru yang kutip dari Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah (<http://www.panduandapodik.id>) terkait pembentukannya terdiri atas:

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
 - a. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - 1) Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - 2) Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
 - c. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - (1) Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - (2) Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
 - d. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
- 3) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- 4) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan;
 - b. Penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan;
 - c. Pemerintahan desa;
 - d. Forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. Forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - g. Pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Dalam penelitian (Sirajuddin, 2016) menjelaskan bahwa komite sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan, yaitu sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, dari jenjang pendidikan, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah

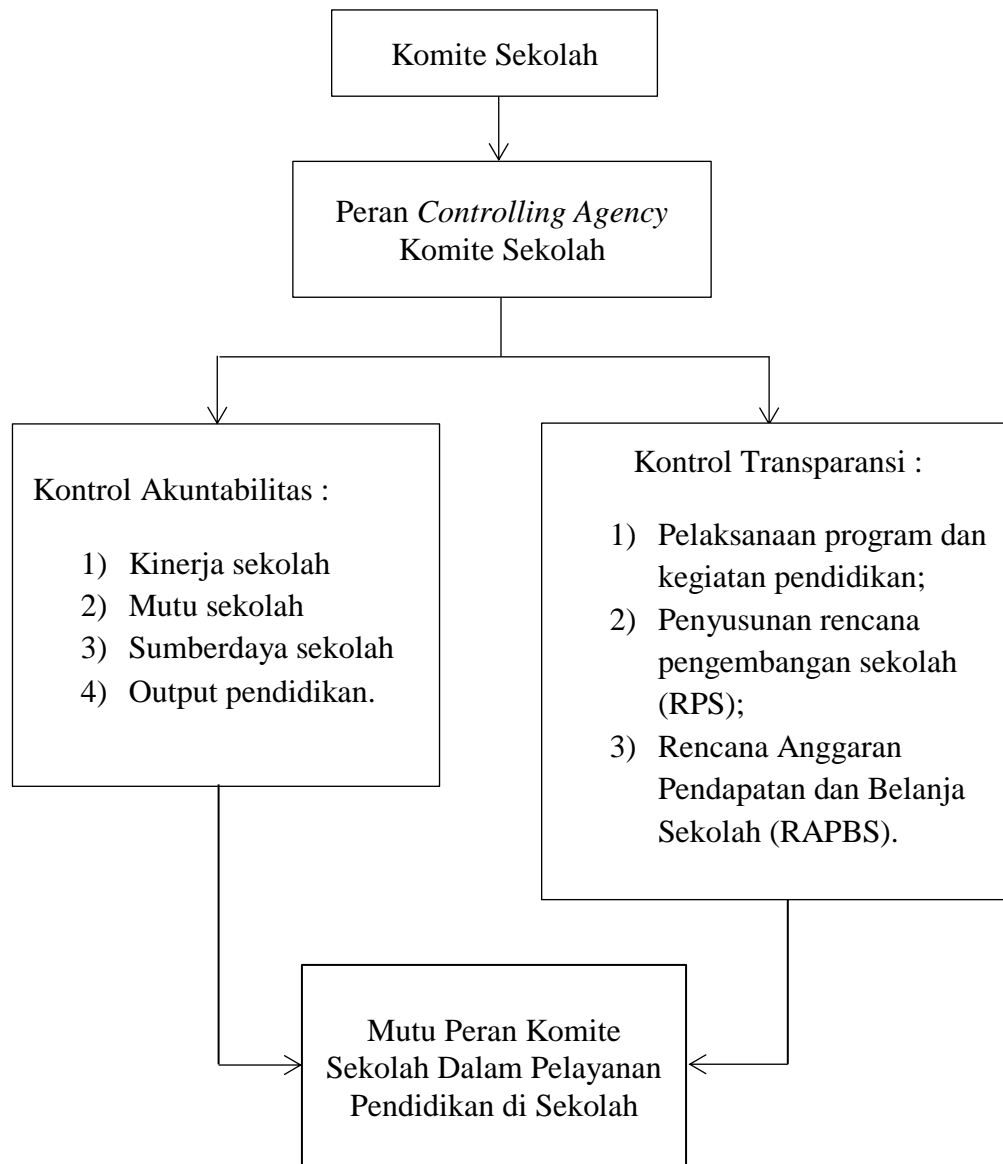
baik sekolah negeri maupun swasta. Pada setiap sekolah terdapat satu komite sekolah. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa sekolah pada satu lokasi, atau beberapa sekolah yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi berkedekatan, atau beberapa sekolah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk koordinator komite sekolah.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). (Departemen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003. Hal.11-12.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan dengan permasalahan yang akan diteliti maka untuk menjalankan peran komite sekolah sebagai badan pengontrol, ini dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan serta output pada lembaga satuan pendidikan untuk memperoleh kontribusi peran komite secara utuh sebagai *Controlling Agency* (Badan Pengontrol).

Komite sekolah dalam memahami perannya sebagai *controlling agency* di sekolah diharapkan dapat melaksanakan indikator kinerjanya yang antara lain adanya kontrol akuntabilitas terhadap pihak sekolah dalam kinerja sekolah, mutu sekolah, sumber daya sekolah dan output pendidikan pada lembaga satuan pendidikan (sekolah). selain itu komite dalam perannya sebagai pengontrol harus dapat mengontrol adanya transparansi pihak sekolah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, transparan dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS), dan transparan terhadap rencana anggaran dan belanja sekolah yang dimana dalam hal ini dapat meningkatkan mutu peran komite sekolah dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, jika digambarkan maka kerangka konsep dalam penelitian ini terkait dengan Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah di SMP Negeri 33 Makassar antara lain sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di lapangan, maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan pertimbangan penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan konsep kinerja dan pemahaman terhadap Peran Komite Sekolah Sekolah sebagai *Controlling Agency* di SMP Negeri 33 Makassar. Selain itu, Penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis dan menafsirkan suatu fakta yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh, diantaranya berupa kata-kata, perilaku, yang dapat diobservasi baik secara lisan maupun tulisan atau dengan kata lain penelitian ini ingin mendeskripsikan kenyataan berdasarkan data dan fakta di lapangan.

Hal ini sesuai yang dikemukakan dalam buku Moleong (2017:6) menjelaskan bahwa :

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam membentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Maka dari itu, keseluruhan dari data yang telah diperoleh dalam pelaksanaan penelitian kualitatif yang berupa diantaranya pernyataan dari para informan digambarkan dalam bentuk narasi sebagai hasil pernyataan lisan. Begitu pula dengan

data yang diperoleh dari hasil pengamatan beserta dokumen penunjang lainnya yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang ditemui di lokasi penelitian dengan teknik yang sama. Semua data-data yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya dipaparkan berdasarkan uraian informasi yang diperoleh dari informan yang mengetahui persis pokok dari persoalan yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan instrumen wawancara dan studi dokumentasi dimana kisi-kisi penelitian disusun dalam lampiran yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun pedoman wawancara terhadap kepala sekolah, dan guru. Dengan metode alamiah ini diharapkan akan terungkap gambaran mengenai realita dari sasaran penelitian, yakni tentang Peran Komite Sekolah sebagai Controlling Agency di SMP Negeri 33 Makassar.

B. Kehadiran Peneliti

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dibantu oleh instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti berusaha agar dapat menghindari pengaruh subyektifitas dan menjaga lingkungan secara alamiah agar proses yang terjadi berjalan sebagaimana biasanya. Dalam penelitian ini peneliti tidak menentukan lamanya maupun harinya. Disisi lain, yang peneliti tekankan adalah keterlibatan langsung peneliti di lapangan dengan informan dan sumber data.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di SMP Negeri 33 Makassar yang merupakan lembaga satuan pendidikan yang telah di kenal sebagai Sekolah Menengah Pertama yang memiliki banyak prestasi baik di bidang Akademik maupun Non akademik. Sekolah ini juga menerapkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimana pihak sekolah diberikan kewenangan dalam mengelolah lembaga satuan pendidikan tanpa mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai wujud dukungan penuh dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah maka di bentuklah Komite Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, peneliti memilih sekolah SMP Negeri 33 Makassar sebagai lokasi pelaksanaan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi penelitian.(Moelong, 2011)

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian, maka diperlukan adanya subjek atau informan penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Pengurus

Komite Sekolah dan Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Makassar sebagai informan kunci. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada kriteria bahwa mereka mengetahui bagaimana Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah Di SMP Negeri 33 Makassar.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan dari bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Metode Wawancara

Peneliti mewawancarai secara langsung kepada pengurus komite sekolah dan kepala sekolah terkait dengan Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah di SMP Negeri 33 Makassar. Informan telah dipilih melalui teknik purposiv sampling yaitu dengan adanya pertimbangan khusus dalam pemilihan informan sebab dianggap dapat memberikan informasi secara mendalam terkait peran *controlling agency* komite sekolah, teknik wawancara ini juga dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam (*in depth interviewe*).

Dalam hal ini, sebagai proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan atau orang yang diwawancarai agar peneliti dapat memperoleh data baik secara kalimat ataupun dengan mengamati mimik wajah seacara intens dan terbuka. Adapun setting penelitian terfokus pada penggalian informasi terhadap informan dengan jenis wawancara terstruktur (*structured interview*).

2. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh peneliti terkait untuk memperoleh pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara melihat dan mengamati terkait dengan implementasi dari Peran Komite Sekolah sebagai *Controlling Agency* di SMP Negeri 33 Makassar. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dari itu, kesimpulannya peneliti melakukan observasi guna untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan peran komite sekolah sebagai badan pengontrol.

3. Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Peneliti disini melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen penunjang sumber informasi terhadap fokus penelitian diantaranya kegiatan wawancara, Visi dan Misi sekolah, Keadaan dan jumlah Guru, Keadaan jumlah siswa, Fasilitas Sekolah, serta keadaan dan suasana lingkungan di sekolah Struktur dan kepengurusan sekolah, struktur komite sekolah, catatan notula rapat komite, daftar hadir komite sekolah, hingga sampai pada catatan pengesahan hasil rapat yang mengikut sertakan pengurus komite.

F. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, keseluruhan data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara menyeluruh dari data yang telah didapat selama proses penelitian berlangsung.

Miles & Huberman (Gunawan, 2015: 210) “ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data yaitu, (1) reduksi data (*data reduction*);(2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).”

Reduksi data dilakukan dalam merangkum, memilih hal-hal pokok dari hasil wawancara, memfokuskan pada hal-hal yang penting pada data yang diperoleh peneliti. Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan yang didapatkan di SMP Negeri 33 Makassar kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilih-pilih hal yang pokok. Pada tahapan ini setelah data dipilih kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan. Data yang akan direduksi yaitu data yang berasal hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan di lapangan.

Data yang sudah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun. *Display* data dilakukan dengan menguraikan data yang telah disortir/direduksi kemudian diuraikan secara mendetail. Penguraian

dilakukan sesuai dengan data yang di dapatkan di SMP Negeri 33 Makassar Penguraian data dilakukan menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi. Setelah melakukan pemaparan data selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi, verifikasi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari data telah direduksi dan dipaparkan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil wawancara yang dikombinasikan dengan data yang diperoleh dari kegiatan observasi dan dokumentasi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Dimana menurut Lexy J. Moleong (2011:330) mengemukakan bahwa “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Pengecekan keabsahan data secara Triangulasi sumber yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pengurus Komite dan Kepala Sekolah. Data dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana yang memiliki pandangan ataupun persepsi yang sama, yang berbeda serta yang memiliki makna jawaban yang spesifik. Selain itu peneliti menggunakan triangulasi teknik, dalam penggunaan teknik

triangulasi empat kriteria yang dapat digunakan, menurut (Gunawan, 2015) yaitu (1) derajat kepercayaan (*creadibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) Kebergantungan (*dependability*), dan (4) Kepastian (*confarmability*). Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji credibility (uji kredibilitas).

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian;
2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data
3. Tahap analisis data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data
4. Tahap pembuatan laporan dan perumusan hasil penelitian, Sebagai laporan akhir yang berisi keseluruhan proses, kesimpulan dan semua yang ditemukan dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan hasil penelusuran penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut deskripsi hasil penelitian melalui prosedur pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang telah diperoleh.

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam mempermudah untuk memahami lokasi penelitian yang menjadi tempat peneliti memperoleh data dilapangan, maka berikut dipaparkan gambaran umum lokasi penelitian :

SMP Negeri 33 Makassar berdiri pada tanggal 05 Oktober 1994 didirikan di jalan Tamalate VIII No. 1 Perumnas Makassar dilengkapi dengan SK pendirian No.0260/C/1994, yang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari jumlah guru, siswa dan staf tata usaha serta gedung sekolah yang telah banyak mengalami perkembangan.

Selama berdirinya SMP Negeri 33 Makassar telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan sekolah. Untuk pergantian jabatan kepala sekolah telah berganti sebanyak enam kali, yang diantaranya adalah:

- a) Drs. Baharuddin G, M.Pd pada tahun 1994-2000

- b) Sangka Rauf, S.Pd pada tahun 2000-2005
- c) Drs. Johani, M.Pd pada tahun 2005-2011
- d) Drs. H. Chairil pada tahun 2011-2013
- e) Drs. Baharuddin G, M.Pd pada tahun 2013-2016
- f) Andi Mardiani Maddusilah, S.Pd., M.Pd pada tahun 2016-sekarang.

2. Profil Sekolah

Nama sekolah	: SMP NEGERI 33 MAKASSAR
NPSN	: 40311918
NSS	: 20.119.600.9208
Provinsi	: Sulawesi Selatan
Otonomi	: Daerah
Kecamatan	: Rappocini
Kabupaten/Kota	: Makassar
Kelurahan	: Kassi-Kassi
Jalan dan Nomor	: Jln. Tamalate VIII No. 1
Kode Pos	: 90222
Telepon	: 0411869885
Faksmile	: 0411869885
Email	: smp33mss@yahoo.co.id
Jenjang	: Sekolah Menengah Pertama
Daerah	: Perkotaan
Status Sekolah	: Negeri
Kategori Sekolah	: Mandiri
Akreditasi	: A
Surat Keputusan/SK	: SK Pendirian No.0260/C/1994. Tgl 05 Oktober 1994
Penerbit SK (ditandatangani oleh)	: -
Tahun Berdiri	: 1992
Tahun Beroperasi	: 1994
Kegiatan Belajar Mengajar	: Pagi
Bangunan Sekolah	: Milik Pemerintah
Luas Bangunan	: 3.151 M ²
Luas Tanah	: 5000 M ²

3. Visi dan Misi SMP Negeri 33 Makassar

Visi dan misi merupakan landasan awal dalam merumuskan program-program yang telah di rencanakan. Visi memberikan gambaran masa depan terhadap suatu organisasi, berperan sebagai pemberi arahan serta motivasi kepada keseluruhan warga sekolah. sedangkan misi berperan untuk mengenalkan sekolah terhadap sumber daya yang dimiliki sekolah adapun visi dan misi SMP Negeri 33 Makassar antara lain sebagai berikut:

a. Visi

Beriman, berilmu, berdisiplin, dan berwawasan lingkungan

b. Misi

- 1) Memberikan pembinaan keagamaan yang baik dan kontinyu kepada peserta didik.
- 2) Meningkatkan kedisiplinan kepada seluruh warga sekolah.
- 3) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan semangat berprestasi peserta didik.
- 4) Meningkatkan keterampilan akademik dan non akademik.
- 5) Meningkatkan mutu lulusan.
- 6) Meningkatkan budi pekerti.
- 7) Meningkatkan mutu pelayanan.
- 8) Meningkatkan sarana dan prasarana.
- 9) Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan sekolah.

- 10) Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah.

4. Fasilitas Sekolah

a. Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 33 Makassar

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan fungsi dan tujuan sekolah, maka SMP Negeri 33 Makassar dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik maka dalam hal ini diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk lebih jelasnya, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 33 Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1 Fasilitas Data ruang kelas SMP Negeri 33 Makassar

Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Asli				Jumlah Ruang lain yang digunakan untuk kelas (e)	Jumlah ruang yang digunakan untuk ruang kelas F=(d+e)
	Ukuran 7x9 m ² (a)	Ukuran <63 m ² (b)	Ukuran <63 m ² (c)	Ukuran (d) =(a+b+c)		
	27	-	-	27 Ruang	-	27 Ruang

Sumber: Arsip Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 33 Makassar TP. 2018/2019

Tabel 4.2 Fasilitas Data Ruang Lain SMP Negeri 33 Makassar

	Jenis Ruangan	JML (Buah)	Ukuran	Ket.
1	Kepala Sekolah	1	10 x 6	Baik
2	Wakil Kepala Sekolah	-	-	-
3	Guru	1	12 x 7	Baik
4	Pegawai/Tata Usaha	1	10 x 6	Baik
5	Perpustakaan	1	12 x 7	Baik
6	Laboratorium IPA	1	15 x 8	Baik
7	Laboratorium Komputer	1	9 x 7	Baik
8	OSIS	1	3,4 x 6,4	Baik
9	BP/BK	1	9 x 7	Baik
10	UKS	1	5 x 12	Baik
11	Mushallah	1	84 m ²	Baik
12	Pramuka	1	4 x 7	Baik
13	PMR	1	3 x 9	Baik
14	WC Siswa	10	10 x 1,5	Baik
15	WC Guru/Pegawai	4	2 x 1,5	Baik
16	Gudang	1	2,5 x 5	Baik
17	Rumah Bujang	1	4 x 3	Baik
18	Lap. Parkir	1	7 x 6	Baik
19	Prakarya	1	2,5 x 4,7	Baik
20	Kurikulum	1	2,6 x 6	Baik

Sumber: Arsip Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 33 Makassar TP. 2018/2019

b. Keadaan Guru/Pegawai SMP Negeri 33 Makassar

Guru merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang berkewajiban menyajikan dan menjelaskan pelajaran, membimbing dan mengarahkan siswa kearah pencapaian tujuan pengajaran, dalam hal ini membutuhkan kemampuan dan keprofesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kualitas serta kapasitas guru adalah faktor

yang sangat penting yang mampu meningkatkan mutu pendidikan. Adapun jumlah guru dan pegawai SMP Negeri 33 Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Keadaan Guru dan Pegawai di SMP Negeri 33 Makassar Tahun 2018/2019

Guru/Staf	Jumlah	Keterangan
Guru Tetap (PNS)	50 Orang	
Guru Honor Sekolah	6 Orang	
Staf Tata Usaha	3 Orang	
Staf Honor Sekolah	10 Orang	

Sumber: Arsip Keadaan Guru dan Pegawai SMP Negeri 33 Makassar TP. 2018/2019

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa guru dan pegawai yang bertugas di SMP Negeri 33 Makassar sebanyak 69 orang, semuanya masih dinyatakan aktif mengajar di SMP Negeri 33 Makassar dan masing-masing guru memiliki peran dan tugas yang dalam hal mendidik serta membimbing siswa.

c. Keadaan Siswa SMP Negeri 33 Makassar dari Tahun 2016/2017

Siswa di SMP Negeri 33 Makassar sebagai salah satu komponen yang dimana mereka yang lulus seleksi yang diadakan setiap tahun oleh pihak sekolah dan sebagaian kecil adalah pindahan dari sekolah lain yang sederajat. Berikut merupakan jumlah siswa yang terdapat di SMP Negeri 33 Makassar dari kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tabel 4.4 Data Siswa 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Th. Pelajaran	Jml. Pendaftar (CLN Siswa Baru)	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah (Kls. VII+VIII+IX)	
		JML Siswa	JML Rombel	JML Siswa	JML Rmbel	JML Siswa	JML Rombel	JML Siswa	JML Rombel
2016/2017	687 Orang	396	11	304	9	341	10	1041	30

2017/2018	425	251	7	382	11	304	9	936	27
	Orang								
2018/2019	562	360	10	251	7	378	11	989	28
	Orang								

Sumber: Arsip Data Siswa SMP Negeri 33 Makassar TP. 2018/2019

d. Susunan Pengurus Komite Sekolah di SMP Negeri 33 Makassar

Kemudian Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Komite sekolah menjelaskan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Adapun susunan pengurus komite yang terdapat di SMP Negeri 33 Makassar yaitu:

Tabel 4.6 Pengurus Komite di SMP Negeri 33 Makassar

No. Urut	Nama	Jabatan Dalam Komite	Keterangan
1.	Drs. Andi Ramli Pangki	Ketua Komite	
2.	Drs. Kusnadi, M.Pd	Wakil Ketua Komite	
3.	Drs. Suardi Hakim	Sekretaris Komite	
4.	Hj. Suriana Hakim, S.Sos	Bendahara Komite	
5.	Drs. Anwar Haris	Anggota Komite	
6.	Drs. Abd. Kahar Kamal, M.M	Anggota Komite	
7.	Nurbiah	Anggota Komite	
8.	Erny, S.E	Anggota Komite	

Sumber: Arsip Data Pengurus Komite Sekolah SMP Negeri 33 Makassar

Pada dasarnya pengurus komite yang terpilih terdiri atas 15 orang, akan tetapi dari data yang diperoleh hanya ada beberapa pengurus ataupun anggota komite yang berperan aktif dalam setiap kegiatan komite sekolah. Pengurus komite yang terpilih berasal dari tokoh masyarakat, guru ataupun orang tua siswa.

5. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk memaparkan atau menyajikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, yaitu berhubungan dengan Peran *controlling agency* komite sekolah di SMP Negeri 33 Makassar. Kemudian data yang dikumpulkan akan dianalisis agar mendapat gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mendapatkan data di lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menggunakan metode wawancara, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan, Pengurus komite sekolah dan Kepala sekolah. Selanjutnya metode observasi, peneliti melakukan observasi untuk mengecek kebenaran data yang ada di lapangan. Kemudian peneliti melakukan dokumentasi untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya.

6. Hasil Penelitian Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah di SMP Negeri 33 Makassar

Dalam uraian berikut akan disajikan data berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimana dalam peran *controlling agency* terkait dengan akuntabilitas dan transparansi sekolah dengan kerjasama bersama komite sekolah.

a. Akuntabilitas

Bertindak sebagai penyelenggara pendidikan yang berperan sebagai pengontrol, komite sekolah sekiranya dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pengontrol adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan baik dalam proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah.

Dalam menjalankan peran akuntabilitas maka yang perlu di tinjau adalah sebagai berikut:

1) Kinerja sekolah

Pengontrol akuntabilitas kinerja sekolah dapat dilihat melalui tingkat pencapaian yang telah diraih dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah melalui program kerja sekolah yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Seperti yang dikatakan RP selaku ketua komite sekolah:

Komite sekolah menjalankan perannya dalam mengontrol kinerja sekolah itu melalui pelaksanaan program sekolah kami memantau dari segi pelaksanaannya saja sebab komite sekolah tidak boleh terlalu jauh menaungi hal-hal terkait sekolah karena pada dasarnya kami hanya melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan komite seperti pada saat pelaksanaan UNBK kemarin kita diundang membicarakan persiapan kegiatan tersebut.

(Wawancara RP, F1.D1.P1 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dalam melaksanakan peran kontrol akuntabilitas komite sekolah, penyelenggaraannya harus memahami bahwa sekolah harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik sebab pada dasarnya penilaian kinerja sekolah didasarkan pada kepuasan publik. Pelaksanaan program sekolah dapat dipantau dengan adanya lembaga mandiri seperti komite sekolah yang dimana

diharapkan dapat mendampingi sekolah dalam mewujudkan program sekolah walaupun tidak serta-merta komite dapat ikut campur dalam segala hal terkait program keseluruhan sekolah ada batasan-batasam yang perlu dipahami antara pihak komite dengan pihak sekolah.

Hal ini sejalan dengan kutipan dari hasil wawancara dari AM selaku kepala sekolah memberikan keterangan bahwa komite sekolah melakukan peran kontrol terhadap akuntabilitas kinerja sekolah dapat dilakukan dengan memantau melalui pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilaporkan setiap dilakukannya pertemuan bersama antara pihak sekolah antara lain yaitu:

Peran kontrol kinerja yang dilakukan komite sekolah yaitu dengan memantau melalui pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilaporkan setiap dilakukannya pertemuan bersama antara pihak sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa.
(wawancara AM, F1.D1.P1 2019)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap AM selaku kepala sekolah memberikan penjelasan bahwa komite sekolah dapat melaksanakan perannya dalam mengontrol akuntabilitas kinerja sekolah melalui pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilaporkan pada saat dilakukan rapat bersama antara pihak sekolah dan komite.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara SH selaku sekretaris komite sekolah yang berpendapat bahwa:

Peran kontrol komite terhadap akuntabilitas kinerja sekolah dilaksanakan dimana pihak sekolah sudah menyusun sedemikian rupa kemudian komite hanya mengamati kembali setiap program yang telah direncanakan tetapi kemudian komite juga tetap ada pertimbangan-pertimbangan terkait hal tersebut yang intinya adalah sekolah sudah mempersiapkan lalu kemudian bersama komite berpartisipasi dalam menyetujuinya.

(wawancara SH, F1.D1.P1 2019)

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut KUS selaku Wakil Komite sekolah berpendapat bahwa:

Menurut saya sebagai komite sekolah harusnya kan semua kegiatan-kegiatan sekolah harus bekerja sama dengan komite sekolah tapi selama ini fungsi yang dimaksud (Kontrol) biasanya hanya sebagai simbol saja jadi peran komite disini tidak terlalu dilibatkan hanya sekedar apa namanya, penyampaian bahwa ada program sekolah yang seperti ini harusnya kan misalnya mulai dari penyusunan RAPBS dilibatkan. Kemudian setelah itu, masuk program sekolah apa-apa yang dibutuhkan oleh sekolah, apa-apa yang dibutuhkan oleh sekolah semua harusnya di sharing kepada komite namun untuk saat ini belum maksimal dilaksanakan.

(Wawancara KUS, F1.D1.P1 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut dalam melaksanakan peran kontrol komite terhadap kinerja sekolah, komite sekolah diberikan wewenang dengan memantau aspek pelaksanaan program sekolah dalam rangka menganalisis kinerja yang telah dicapai oleh sekolah yang dalam hal ini mengacu pada pencapaian Visi dan Misi sekolah walaupun pada hakikatnya sepenuhnya sekolah telah menyusun dan mempersiapkan sedemikian rupa tetapi komite sekolah tetap dilibatkan sebagai pihak yang patut mempertimbangkan masa depan lembaga sekolah dan kemajuan prestasi peserta didik di sekolah.

Selanjutnya wawancara terhadap KA selaku anggota komite sekolah menyatakan bahwa:

Selama ini sepengetahuan saya, sekolah selalu melakukan pertemuan dengan komite sekolah untuk membahas hal-hal yang juga ada kaitannya dengan komite. Saya lihat bahwa apa yang dilakukan sekolah sudah berjalan bagus terbukti disana itu banyak prestasi-prestasi yang didapatkan seperti yang dilihat disana banyak piala-piala

disamping itu banyak kegiatan ekstra kurikulernya dan lumayanlah secara kasat mata itu yang dapat kita lihat bersama-sama.
(Wawancara KA, F1.D1.P1 2019)

Berdasarkan hasil wawancara sekolah selalu melakukan rapat bersama komite guna membahas hal-hal yang dapat melibatkan komite sekolah untuk berpartisipasi termasuk perkembangan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan sekolah ataupun prestasi-prestasi siswa lainnya.

Kesimpulan dari keseluruhan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan menjelaskan bahwa peran kontrol akuntabilitas komite sekolah, penyelenggaraannya harus memahami bahwa sekolah harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik sebab pada dasarnya penilaian kinerja sekolah didasarkan pada kepuasan publik, memberikan wewenang kepada komite sekolah dengan memantau aspek pelaksanaan program sekolah dalam rangka menganalisis kinerja yang telah dicapai oleh sekolah yang dalam hal ini mengacu pada pencapaian Visi dan Misi sekolah.

Selain wawancara, peneliti melakukan observasi Pada tanggal 30 April 2019 dengan melakukan pengamatan langsung di lingkungan SMP Negeri 33 Makassar. Hasil observasi di SMP Negeri 33 Makassar peneliti mengamati bahwa prestasi-prestasi yang diraih oleh sekolah bukan hanya berasal dari peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

Selain dari pada itu, peneliti memperoleh data dari hasil dokumentasi yang menunjukkan bahwa tenaga pendidik di SMP Negeri 33 Makassar terbilang bagus

dilihat dari pencapaian guru yang mendapatkan Juara I dalam Olimpiade Guru Nasional Bidang Matematika Tingkat Kota Makassar Tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 33 Makassar menerangkan bahwa peran kontrol akuntabilitas komite sekolah, penyelenggaraannya harus memahami bahwa sekolah harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik sebab pada dasarnya penilaian kinerja sekolah didasarkan pada kepuasan publik, memberikan wewenang kepada komite sekolah dengan memantau aspek pelaksanaan program sekolah dalam rangka menganalisis kinerja Kepala sekolah, Guru, hingga sampai pada prestasi siswa yang telah dicapai di sekolah yang dalam hal ini mengacu pada pencapaian Visi dan Misi sekolah.

2) Pengembangan mutu sekolah

Pengembangan mutu sekolah dapat dilakukan Komite sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan antara lain dengan melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada. Terkait hal tersebut adapun hasil wawancara yang dilakukan terhadap AM selaku kepala sekolah menyatakan bahwa:

Pada dasarnya setiap hal-hal yang berkenaan dengan mutu sekolah komite sekolah berpartisipasi bukan hanya memberikan bantuan berwujud material saja, tetapi juga membantu memberikan ide-ide, pemikiran, dan tindakan-tindakan inovatif.
(Wawancara AM, F1.D1.d2.P2 2019)

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara yang pada dasarnya secara terbuka pihak sekolah melakukan diskusi bersama untuk menemukan jalan terbaik dalam pengambilan keputusan dengan tanpa sepihak. Sekolah mengadakan rapat bersama komite baik membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sekolah hingga pada pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran seperti pelaksanaan UNBK. Sekolah tetap melibatkan komite dan orang tua siswa dalam mempersiapkan segala kebutuhan siswa untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap RP selaku ketua komite yang berpendapat bahwa:

Terkait dengan pengontrolan akuntabilitas terhadap pengembangan mutu sekolah itu dilakukan dengan cara melihat riwayat prestasi peserta didik secara periodik baik secara akademik maupun non akademik sekaligus dari laporan-laporan yang diperbincangkan pada saat dilakukannya pertemuan antara pihak sekolah, guru dan orang tua siswa.

(Wawancara RP, F1.D1.d2.P2 2019)

Sejalan dengan hal tersebut adapun jawaban yang dikemukakan oleh SH selaku sekretaris komite dengan berpendapat bahwa:

Jadi, itu dimulai dengan perencanaan dan pelaksanaan program sekolah seperti juga kegiatan ekstrakurikuler kami melihat perkembangan siswa melalui itu, partisipasi dalam perlombaan, pencapaian prestasi akademik siswa hal itu semua dapat terpantau ketika diadakannya rapat.

(Wawancara SH, F1.D1.d2.P2 2019)

Hasil wawancara menerangkan komite sekolah melakukan peran kontrol terhadap akuntabilitas mutu sekolah melalui riwayat prestasi peserta didik secara periodik baik secara akademik maupun non akademik sekaligus dari laporan-laporan

yang diperbincangkan pada saat dilakukannya pertemuan antara pihak sekolah, guru dan orang tua siswa.

Peneliti melakukan wawancara kepada K selaku anggota komite sekolah memberikan pendapat yaitu:

Mutu sekolah sejauh dari pengamatan saya sebagai anggota komite cukup bagus karena secara periodik itu melakukan sosialisasi kepada siswa dan termasuk orang tua/wali untuk memberikan motivasi kepada anak-anak sebab disamping tanggung jawab sekolah diluar sekolah juga diharapkan bagaimana orang tua ini dapat memberikan motivasi jadi antara sekolah dan orang tua dapat sejalan jadi melalui hal tersebut ada kerja sama yang baik antara sekolah dan orang tua dalam hal ini termasuk komite didalamnya. Hal tersebut dapat berpengaruh juga terhadap eksistensi sekolah di ruang publik.
(Wawancara K, F1.D1.d2.P2 2019)

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara yang menjelaskan mutu sekolah sejauh ini sudah cukup bagus karena secara periodik sekolah melakukan sosialisasi kepada siswa dan termasuk orang tua/wali untuk melakukan kerjasama agar tetap memotivasi siswa agar tetap dapat berprestasi dan memajukan mutu sekolah.

Selain dari pada itu, peneliti melakukan wawancara terhadap KUS selaku Wakil ketua komite:

Dalam pengembangan mutu komite sekolah, komite diberi wewenang untuk mengontrol tentang perkembangan sejauh mana mutu sekolah tapi kembali lagi bahwa rata-rata komite sekolah itu hanya diundang sebagai pelengkap saja istilahnya sudah barang jadi baru diberikan kepada pihak komite sehingga peran komite sekolah dalam hal peningkatan mutu itu sebenarnya sangat besar peranannya cuma itu tadi karena berbagai unsur dan kesulitan-kesulitan mungkin biasanya sekolah menganggap bahwa untuk mengumpulkan pengurus komite ini sulit sehingga konsep-konsep yang disodorkan dari sekolah ke komite ya tinggal komite menyetujui saja harusnya kan semua unsur komite harus mempertimbangkan juga kekurangannya dimana dan mana yang perlu dikembangkan.

(Wawancara KUS, F1.D1.d2.P2 2019)

Berdasarkan hasil wawancara komite sekolah diberikan wewenang untuk ikut dalam program pengembangan mutu sekolah tapi dalam hal ini komite sekolah hanya diundang sebagai pelengkap saja selebihnya segala sesuatunya telah dipersiapkan oleh sekolah kemudian komite sekolah ikut menyetujui sebab adanya kesulitan-kesulitan yang mungkin pihak sekolah beranggapan bahwa untuk mengumpulkan pengurus komite sangatlah sulit melihat dari adanya kesibukan masing-masing dari pengurus komite.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara pada dasarnya secara terbuka pihak sekolah melakukan diskusi bersama untuk menemukan jalan terbaik dalam pengambilan keputusan dengan tanpa sepihak, komite sekolah melakukan peran kontrol terhadap akuntabilitas mutu sekolah melalui riwayat prestasi peserta didik secara periodik baik secara akademik maupun non akademik sekaligus dari laporan-laporan yang diperbincangkan pada saat dilakukannya pertemuan antara pihak sekolah, guru dan orang tua siswa.

Selain itu, hasil observasi yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana di SMP Negeri 33 Makassar telah cukup memadai. Sedangkan dari hasil studi dokumentasi, yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan pengembangan mutu disekolah dilakukan dengan adanya persiapan fasilitas yang memadai yang diberikan kepada siswa untuk menunjang pelaksanaan program sekolah hal ini dilihat dari data arsip tata usaha yang diperoleh peneliti di SMP Negeri 33 Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 33 Makassar menunjukkan bahwa komite sekolah melakukan peran kontrol terhadap akuntabilitas mutu sekolah melalui riwayat prestasi peserta didik secara periodik baik secara akademik maupun non akademik sekaligus dari laporan-laporan yang diperbincangkan pada saat dilakukannya pertemuan antara pihak sekolah, guru dan orang tua siswa. Selain itu, pengembangan mutu disekolah dilakukan dengan adanya persiapan fasilitas yang memadai yang diberikan kepada siswa untuk menunjang pelaksanaan program sekolah hal ini dilihat dari data arsip tata usaha yang diperoleh peneliti di SMP Negeri 33 Makassar

3) Sumberdaya sekolah

Komite sekolah dalam menjalankan perannya dalam mengontrol akuntabilitas sumber daya sekiranya dapat memantau pemenuhan sumber daya sekolah bagi peserta didik yang dimana ini dapat menunjang aktivitas pembelajaran hingga sampai pada pengelolaan lembaga sekolah itu sendiri.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada RP selaku ketua komite antara lain:

Dilihat dari segi sumber daya sekolah dalam hal ini sarana dan prasarana memang sangat-sangat terbatas juga sehingga komite memutuskan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah bersama-sama meninjau mencari jalan keluarnya apa yang menjadi hambatan terhadap proses belajar mengajar di sekolah dengan cara seperti ini ya saya kira bukan hanya sekedar mengontrol saja.
(Wawancara RP, F1.D1.d3.P3 2019)

Hasil wawancara menerangkan bahwa dilihat dari segi sumber daya sekolah dalam hal saran dan prasarana komite sekolah memutuskan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan cara bersama-sama meninjau mencari jalan keluar agar bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana sekolah tetap terpenuhi dalam rangka menunjang proses belajar siswa.

Sejalan dengan hal tersebut adapun hasil wawancara SH selaku sekretaris komite sekolah yaitu:

Komite dalam hal ini secara berkala hadir disekolah terutama ketua komite bersama wakilnya dan sekretaris juga saling bekerja sama terutama kan wakil dan sekretaris itu berasal dari lingkungan sekolah dalam hal ini guru yang kebetulan juga salah satu orang tua siswa disini, jadi secara tidak langsung dapat mengontrol hal tersebut ketika ada rapat guru mengenai sumber daya sekolah otomatis kita juga mengetahui hal tersebut serta dapat mengontrol langsung sumber-sumber daya sekolah walau bukan ketua yang melakukan itu tetapi nantinya juga kita saling menginformasikan itu semua, seperti pelaksanaan RAPBS, disiplin guru, disiplin tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing itu sudah termasuk kontrolnya komite itu.

(Wawancara SH, F1.D1.d3.P3 2019)

Berdasarkan dari hasil wawancara ketua komite dalam hal ini sering hadir dalam rapat yang diadakan sekolah terutama wakil dan sekretaris komite yang tidak lain merupakan tenaga pengajar di SMP Negeri 33 Makassar sekaligus juga adalah orang tua/wali dari salah satu siswa yang dapat lebih mempermudah secara tidak langsung dapat mengontrol sumberdaya sekolah walau bukan secara langsung ketua komite yang bertindak namun pada dasarnya semua pengurus komite akan saling berbagi informasi terkait sumberdaya sekolah seperti terhadap sumberdaya

pelaksanaan RAPBS, kegiatan disiplin guru, disiplin tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Hasil wawancara dari KUS selaku wakil ketua komite memberikan jawaban bahwa “Setiap kegiatan itu harus dilaporkan dimintai pertanggung jawaban secara tertulis terkait hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah itu dilaporkan kepada komite secara terbuka dan transparan”. (Wawancara F1.D1.d1.P3 2019). Berdasarkan jawaban yang diperoleh setiap kegiatan itu harus dilaporkan dan dimintai pertanggung jawaban secara tertulis kepada pihak komite sekolah termasuk didalamnya pengelolaan dari sumberdaya sekolah maka pihak sekolah melaporkan secara transparan sesuai pertanggung jawabannya masing-masing.

Senada dengan hal tersebut AM kepala sekolah memberikan jawaban wawancara bahwa “Hubungan sekolah dengan komite saling mendukung satu sama lain terkait sumber daya sekolah sekolah kami bersama komite sekolah selalu bekerja sama setiap tahun dalam persiapan UNBK jadi semua pihak berunding sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, bersama-sama kami mencari jalan tengah merumuskan hal-hal yang perlu ditanggapi seperti sebelumnya yang telah dikatakan bahwa komite membantu kami mencari sumbangsi dana dari orang tua siswa tanpa mematok seberapa banyak yang harus disumbangkan melainkan disini mereka memberikan alakadarnya saja lalu kemudian dimanfaatkan untuk pengadaan Komputer”. (Wawancara AM, F1.D1.d3.P3 2019)

Hasil wawancara menerangkan bahwa hubungan sekolah dengan komite saling mendukung satu sama lain terkait sumber daya sekolah sekolah kami bersama

komite sekolah selalu bekerja sama setiap tahun dalam persiapan UNBK semua pihak berunding sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, bersama-sama mencari jalan tengah merumuskan hal-hal yang perlu ditanggapi seperti sebelumnya yang telah dikatakan bahwa komite membantu kami mencari sumbangsi dana dari orang tua siswa tanpa mematok seberapa banyak yang harus disumbangkan melainkan disini mereka memberikan alakadarnya saja lalu kemudian dimanfaatkan untuk pengadaan computer jadi dalam aspek akuntabilitas sumberdaya sekolah komite sekolah selain mengontrol memberikan pula bantuan secara *finacial* terhadap pihak sekolah.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara K selaku anggota pengurus komite, yaitu:

Kalau akuntabilitasnya itu bagus, saya beberapa kali disampaikan laporan-laporan terutama yang melibatkan komite jadi sekolah memberikan laporan-laporan yang berkaitan dengan sumberdaya sekolah termasuk fasilitas saran dan prasarana, tenaga pendidik hingga sampai pada penggunaan dana sekolah juga yang dimana ada sangkut pautnya dengan komite. Jadi disini komite dapat memantau hal-hal yang tidak berjalan dengan baik ya kita sebagai komite harus melakukan beberapa pertimbangan dan mngoreksi hal tersebut termasuk kemarin fasilitas dalam menghadapi UNBK.

(Wawancara K, F1.D1.d3.P3 2019)

Menurut jawaban K yang merupakan anggota pengurus komite terkait akuntabilitas sekolah menyampaikan setiap laporan-laporan kepada komite sekolah berkaitan dengan sumberdaya sekolah termasuk fasilitas sarana dan prasarana, tenaga pendidik hingga sampai pada penggunaan dana sekolah sebagai dewan pertimbangan

untuk mengoreksi segala sesuatunya contohnya seperti fasilitas yang harus disediakan sekolah dalam pelaksanaan UNBK.

Keseluruhan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dilihat dari segi sumber daya sekolah dalam hal saran dan prasarana komite sekolah memutuskan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan cara bersama-sama meninjau mencari jalan keluar agar bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana sekolah tetap terpenuhi dalam rangka menunjang proses belajar siswa. Ketua komite dalam hal ini, sering hadir dalam rapat yang diadakan sekolah terutama wakil dan sekretaris komite yang tidak lain merupakan tenaga pengajar di SMP Negeri 33 Makassar sekaligus juga adalah orang tua/wali dari salah satu siswa yang dapat lebih mempermudah secara tidak langsung dapat mengontrol sumberdaya sekolah maka setiap kegiatan itu harus dilaporkan dan dimintai pertanggung jawaban secara tertulis kepada pihak komite sekolah termasuk didalamnya pengelolaan dari sumberdaya sekolah maka pihak sekolah melaporkan secara transparan sesuai pertanggung jawabannya masing-masing selain dari pada itu, dalam aspek akuntabilitas sumberdaya sekolah komite sekolah selain mengontrol memberikan pula bantuan secara *finacial* terhadap pihak sekolah.

Dari observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa komite sekolah berperan aktif dalam setiap rapat yang dilaksanakan oleh sekolah. Adapun, Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti berdasarkan buku agenda rapat komite. Menunjukkan bahwa, setiap tahun komite sekolah melakukan rapat koordinasi bersama pengurus komite sekolah dan orang tua siswa untuk memperoleh sumbangan

sukarela untuk bantuan dana pengadaan laptop/komputer dalam rangka pelaksanaan UNBK.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 33 Makassar mengungkap bahwa sekolah dalam hal saran dan prasarana komite sekolah memutuskan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan cara bersama-sama meninjau mencari jalan keluar agar bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana sekolah tetap terpenuhi dalam rangka menunjang proses belajar siswa. Selain itu juga, buku agenda rapat komite menunjukkan bahwa setiap tahun komite sekolah melakukan rapat koordinasi bersama pengurus komite sekolah dan orang tua siswa untuk memperoleh sumbangan sukarela untuk bantuan dana pengadaan laptop/komputer dalam rangka pelaksanaan UNBK.

4) Output sekolah

Dalam Mengontrol output pendidikan, komite sekolah dapat melaksanakan fungsi manajemen pendidikan sebagai badan komite harus dapat memantau hasil ujian akhir, memantau angka partisipasi sekolah, memantau angka mengulang, serta angka bertahan di sekolah. Untuk dapat melaksanakan peran ini komite sekolah berkewajiban berperan aktif untuk tetap mendampingi sekolah dan memantau terlaksananya akuntabilitas output sekolah yang dapat dilihat dari aspek pemantauan hasil ujian akhir siswa, mengontrol angka partisipasi sekolah, mengontrol terjadinya angka mengulang hingga pada angka bertahan siswa di sekolah.

Oleh karena itu, untuk melihat terlaksananya peran kontrol terhadap akuntabilitas output sekolah maka peneliti melakukan wawancara terhadap KUS selaku wakil ketua komite memberikan keterangan bahwa:

Ini yang belum nampak, biasanya yang melakukan itu Guru BK yang biasanya memberikan angket pernyataan kepada siswa yang lulusannya kemudian setelah diterima di sekolah kemudian dikembalikan dan yang sangat penting adalah komite sekolah membentuk ikatan alumni sehingga disitu secara tidak langsung kita dapat mengontrol alumni-alumni kita berada setelah tamat, bekerja dan lain sebagainya.

(Wawancara KUS, F1.D1.d4.P4 2019)

Sejalan dengan hal tersebut peneliti memperoleh hasil wawancara yang tidak jauh beda dari yang dikemukakan RP yang merupakan Ketua komite sekolah, yaitu:

Jadi kita tetap juga memberikan pengawasan terhadap akuntabilitas output sekolah termasuk pengawasan dari segi proses belajar kita saling berbagi informasi dengan guru selain itu yang sangat penting juga adalah komite sekolah membentuk dan melakukan temu alumni sehingga disitu secara tidak langsung kita dapat mengontrol alumni-alumni sekolah.

(Wawancara RP, F1.D1.d4.P4 2019)

Hasil wawancara informan diatas menampakkan komite membentuk ikatan alumni sehingga disitu secara tidak langsung pihak komite sekolah dapat mengontrol alumni-alumni sekolah setelah menyelesaikan studi. Pada umumnya, guru BK yang biasanya memberikan angket berupa pertanyaan kepada siswa yang telah lulus lalu kemudian mengisi angket tersebut untuk memperoleh kemana siswa tersebut akan melanjutkan studi. Selain itu, komite melakukan kontrol termasuk dalam hal proses belajar mengajar dengan berbagi informasi terhadap guru-guru di sekolah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada AM selaku Kepala sekolah yang menyatakan bahwa:

Penelusuran terkait output sekolah dilakukan melalui adanya ikatan alumni sekolah selain itu kami bersama komite juga memantau dari siswa dan yang lainnya terkait dengan lulusan sekolah disini berapa-berapa yang diterima di sekolah unggulan dan lain sebagainya. Jadi sekolah dan komite memiliki hubungan kerjasama yang baik setiap pelaksanaan ujian kami terlebih dahulu melakukan rapat bersama komite membicarakan sekian siswa yang akan ikut ujian.
(Wawancara AM, F1.D1.d4.P4 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penelusuran terkait output sekolah dilakukan melalui ikatan alumni mengontrol informasi lulusan dari siswa ke siswa selain itu hubungan sekolah dan komite memiliki kerjasama yang baik dan berperan aktif terhadap kegiatan sekolah. Sebelum pelaksanaan ujian terlebih dahulu sekolah dan komite mengadakan rapat bersama guna membahas jumlah siswa yang akan mengikuti ujian dan seberapa jauh persiapan sekolah dalam memfasilitasi para siswa yang akan melakukan ujian.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara terkait peran kontrol terhadap akuntabilitas output sekolah kepada SH sebagai sekretaris komite yang memberikan jawaban yaitu:

Pertama prestasi-prestasi sekolah dalam mengikuti lomba-lomba baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun dari pihak lain, kemudian hasil ujian nasional siswa, jumlah lulusan yang telah diterima di sekolah-sekolah favorit ya itu kita telusuri semua berapa yang masuk di SMK favorit ya sampai disana kita punya penelusuran itu.
(Wawancara SH, F1.D1.d4.P4 2019)

Wawancara diatas menjelaskan komite sekolah melihat dari hasil prestasi-prestasi siswa dalam mengikuti lomba baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun dari pihak lain kemudian memeriksa hasil ujian nasional siswa jumlah lulusan yang memenuhi kriteria kelulusan hingga sampai pada penelusuran terhadap sekian siswa yang diterima di SMK/SMA favorit.

Senada dengan hal tersebut, peneliti memperoleh hasil wawancara dari K yaitu anggota pengurus komite “Berbicara output sekolah dalam hal ini menyangkut lulusan sekolah cukup bagus bahkan beberapa tahun terakhir sekolah SMP Negeri 33 termasuk sekolah unggulan dan menjadi buruan oleh calon peserta didik yang akan lanjut di sekolah menengah pertama. Jadi saya sebagai anggota komite yang dimana juga sebagai orang tua dari salah satu siswa disana memberikan apresiasi yang positif terhadap sekolah tersebut”. Berdasarkan yang dikatakan K sebagai anggota pengurus komite bahwa output sekolah dalam hal ini menyangkut lulusan sekolah sudah cukup bagus beberapa tahun terakhir sekolah SMP Negeri 33 Makassar termasuk sekolah unggulan dan menjadi target oleh banyaknya calon peserta didik baru yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama.

Berdasarkan dari keseluruhan hasil wawancara diatas dengan di dukung adanya hubungan baik antara komite sekolah dan pengelola sekolah, komite melakukan *controlling* terhadap akuntabilitas output sekolah melalui ikatan alumni peserta didik mengontrol informasi lulusan dari siswa ke siswa selain itu dalam pelaksanaan evaluasi atau dalam hal ini pelaksanaan ujian pihak sekolah dan komite

selalu melaksanakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan ujian para peserta didik membahas seberapa jauh kesiapan sekolah dalam melaksanakan ujian hingga sampai pada tingkat pencapaian kriteria kelulusan siswa.

Hasil observasi yang diperoleh peneliti dilapangan memperlihatkan bahwa komite sekolah melakukan kerjasama dengan sekolah dalam persiapan pelaksanaan UNBK , selain itu komite sekolah mengontrol lulusan sekolah bekerjasama dengan guru BK. Adapun hasil studi dokumentasi, yang dilakukan oleh peneliti pihak sekolah melaporkan jumlah peserta didik yang akan mengikuti UNBK yang dimana pada tahun ini berdasarkan catatan dari sekretaris komite jumlah peserta ujian Nasional di SMP Negeri 33 Makassar tercatat keseluruhan berjumlah 381 Siswa yang dalam hal ini Laki-laki sebanyak 188 orang dan siswa yang berjenis perempuan berjumlah 193 Siswi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa komite melakukan *controlling* terhadap akuntabilitas output sekolah melalui ikatan alumni peserta didik mengontrol informasi lulusan dari siswa ke siswa selain itu dalam pelaksanaan evaluasi atau dalam hal ini pelaksanaan ujian pihak sekolah dan komite selalu melaksanakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan ujian para peserta didik membahas seberapa jauh kesiapan sekolah dalam melaksanakan ujian hingga sampai pada tingkat pencapaian kriteria kelulusan siswa selain itu juga pihak sekolah selalu melaporkan jumlah peserta didik yang akan mengikuti UNBK.

b. Transparansi

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekolah

Dalam mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan sekolah hal-hal yang perlu dikontrol oleh pengurus komite SMP Negeri 33 Makassar adalah mencakup tentang hal ini adalah mengontrol organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, memantau sumber daya pelaksana program, dan memantau partisipasi *stake-holder* pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah. Berdasarkan hal tersebut mengenai keterlibatan komite sekolah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekolah RP selaku ketua komite menyatakan bahwa:

Terkait dengan dimintai jajak pendapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan disekolah itu sering dilakukan dalam hal ini semua unsur dilibatkan bukan hanya komite sekolah tetapi semuanya berkumpul kemudian diambil keputusan bersama tidak terlepas dari sepengetahuan pihak orang tua siswa jadi kita sama-sama berunding dan hasil keputusannya kita sepakati bersama.
(Wawancara RP, F1.D2.d2.P1 2019)

Jawaban hasil wawancara RP menerangkan terkait pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di sekolah sering dilakukan rapat bersama semua dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan dengan sepengetahuan dari pihak orang tua siswa. Sejalan dengan hal tersebut SH selaku sekretaris komite memberikan keterangan bahwa:

Ya seringlah karena kebetulan kita juga termasuk orang disekolah kadang-kadang kita diskusi atau sharing dengan teman-teman guru terkait dengan program sekolah hal-hal yang perlu dikembangkan seperti apa dan lain sebagainya seperti misalnya pelaksanaan UNBK ya itu kita diskusikan bersama-sama bagaimana sekolah melaksanakan

kegiatan itu dengan didukung sumber daya sarana yang memadai seperti kebutuhan komputer yang akan digunakan dan bagaimana kita bisa sediakan itu untuk siswa dalam hal ini juga tidak terlepas dari sepengetahuan orang tua siswa kita tetap diskusikan itu sama-sama. (Wawancara SH, F1.D2.d2.P1 2019)

Jawaban informan SH bahwa komite sekolah diskusi atau *sharing* dengan dewan guru terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sekolah membahas hal-hal yang perlu dikembangkan seperti misalnya pelaksanaan UNBK yang diskusikan bersama-sama bagaimana sekolah melaksanakan kegiatan itu dengan didukung sumber daya sarana yang memadai seperti kebutuhan komputer yang akan digunakan dan bagaimana kita bisa sediakan itu untuk siswa dalam hal ini juga tidak terlepas dari sepengetahuan orang tua siswa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap AM selaku kepala sekolah untuk mendapatkan informasi sejauh mana komite sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekolah di SMP Negeri 33 Makassar. Adapun jawaban yang diperoleh yaitu “Kami sering meminta jajak pendapat kepada komite sekolah terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di sekolah sebab komite disini juga dilibatkan dalam pelaksanaan program kami sesuai dengan tujuan dari program yang kita buat bersama-sama dengan komite”.(Wawancara AM, F1. D2.d2.P1 2019).

Sama halnya yang dikatakan KUS selaku Wakil ketua komite “Kalau itu sering, cuman ya maksudnya jajak pendapatnya itu semua unsur dilibatkan bukan hanya komite sekolah tetapi semuanya berkumpul kemudian diambil keputusan bersama, misalnya pelaksanaan UNBK dan perlu adanya pengadaan komputer diundanglah

komite sekolah guru-guru dan berbicara bahwa apa yang dibutuhkan sekolah adalah lalu kemudian dilemparlah ke orang tua siswa untuk sama-sama berunding dan hasil keputusan itulah yang terjadi”.(Wawancara KUS, F1.D2.d2.P1 2019).

Sejalan dengan hal tersebut K sebagai anggota pengurus komite juga berpendapat “Kita secara langsung ikut dalam rapat dan diberikan kesempatan untuk berpendapat terkait hal tersebut. Belum lama ini, sebelum pelaksanaan UNBK kemarin kita pihak komite sekolah dipanggil untuk menghadiri rapat bersama Kepala sekolah, dewan guru termasuk didalamnya orang tua siswa yang akan mengikuti ujian untuk membahas persiapan serta kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan UNBK”.(Wawancara K, F1.D2.d2.P1 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai informan wawancara terkait pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di sekolah sering dilakukan rapat bersama semua dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan dengan sepengetahuan dari pihak orang tua siswa. Sekolah meminta jajak pendapat kepada komite sekolah terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di sekolah sebab komite disini juga dilibatkan dalam pelaksanaan program kami sesuai dengan tujuan dari program yang telah buat bersama-sama dengan komite membahas hal-hal yang perlu dikembangkan seperti misalnya pelaksanaan UNBK yang diskusikan bersama-sama bagaimana sekolah melaksanakan kegiatan itu dengan didukung sumber daya sarana.

Hasil observasi yang diperoleh peneliti dilapangan, sebelum dan sesudah dilaksanakannya program sekolah komite sekolah dan kepala sekolah selalu

melakukan koordinasi sebab dalam pelaporan hasil kegiatan komite ikut bertanggung jawab.

Selain itu, hasil studi dokumentasi yang dianalisis oleh peneliti pada setiap rapat yang diikuti dalam pelaksanaan program sekolah, komite melakukan penetapan keputusan bersama sesuai dari data yang diperoleh dalam buku agenda komite sekolah dalam hal ini disetujui dan ditanda tangani oleh pengurus komite sekolah seperti ketua komite dan wakil/ketua komite beserta anggota pengurus komite lainnya yang hadir pada rapat tersebut guna sebagai saksi dalam penetapan hasil rapat, adapun program yang dilaksanakan sekolah seperti pelaksanaan sekolah Adiwiyata yang dalam hal ini tetap dalam pengawasan komite sekolah dan kepala sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh peneliti di SMP Negeri 33 Makassar bahwa pihak sekolah sering meminta jajak pendapat kepada komite sekolah terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di sekolah sebab komite disini juga dilibatkan dalam pelaksanaan program kami sesuai dengan tujuan dari program yang telah buat bersama-sama dengan komite membahas hal-hal yang perlu dikembangkan.

2) Penyusunan Rencana Program Sekolah

Dalam penyusunan perencanaan program kepala sekolah melibatkan guru serta melibatkan masyarakat/orang tua siswa, komite sekolah, peserta didik dan dinas pendidikan kabupaten yang dimana semuanya itu harus bekerjasama secara terpadu. Kepala sekolah hendaknya mengonfirmasikan kepada dewan komite sekolah tentang pengembangan sekolah yang akan di rencanakan guna terjalannya kerja sama antara

sekolah dengan pengurus komite sekolah sebagai wadah penghubung antara sekolah dengan masyarakat.

Berlandaskan hal tersebut peneliti melakukan wawancara RP selaku ketua komite sekolah yaitu:

Kalau ditinjau dari sisi transparansi sekolah saya rasa pihak sekolah sudah terbuka terhadap kami dan komite juga tidak bisa terlalu jauh ikut campur urusan sekolah karena kita masing-masing memiliki batasan baik dari pihak komite ataupun pihak sekolah. Jadi disini, komite hanya dimintai pendapat terkait rencana pengembangan sekolah yang terlebih dahulu disusun oleh sekolah lalu kemudian meminta umpan balik dari kami terkait apa-apa saja yang ada didalamnya.

(Wawancara RP, F1.D2.d2.P2 2019)

Senada dengan jawaban RP peneliti melakukan wawancara terhadap KUS selaku Wakil ketua komite yang memberikan jawaban bahwa:

Saya rasa itu relatif setiap sekolah berbeda ada yang dilibatkan dan ada juga yang tidak, kalau disekolah ini rencana yang sudah matang kita pihak sekolah tinggal melihat dan mempertimbangkan bahwa ya ini memang yang kita butuhkan kemudian dilaporkan.

(Wawancara KUS, F1.D2.d2.P2 2019)

Hasil wawancara menjelaskan bahwa komite sekolah sering dimintai pendapat terkait rencana pengembangan sekolah yang terlebih dahulu disusun oleh sekolah yang kemudian meminta umpan balik dari komite terkait perencanaan yang telah disusun setelah semua perencanaan telah disepakati maka hal-hal tersebut dibuatkan laporan yang kemudian disetujui oleh pihak komite sekolah.

Selanjutnya hasil wawancara dari SH selaku Sekretaris komite yang berpendapat, yaitu:

Tentunya pihak sekolah melibatkan komite sekolah dalam hal penyusunan rencana pengembangan sekolah dikarenakan komite ikut andil dalam memikirkan secara bersama-sama untuk menentukan hal terbaik bagi sekolah termasuk apa yang menjadi kekurangan sekolah dan mana yang perlu dikembangkan lagi, semua itu haruslah dibutuhkan juga pertimbangannya komite dan saya rasa itu sudah termasuk secara langsung mengontrol penyusunan pengembangan yang ada disekolah sekolah.

(Wawancara SH, F1.D2.d2.P2 2019)

Berdasarkan jawaban SH yang menjelaskan bahwa pihak sekolah melibatkan komite sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah sebab komite sekolah dalam hal ini ikut bertanggung jawab dalam pelaporan RPS, selain dari pada itu komite dianggap dapat memberikan sebuah pertimbangan-pertimbangan yang akan membantu sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah oleh karenanya sekolah melakukan rapat bersama dengan komite sekolah.

Jawaban yang tidak jauh beda dengan K selaku anggota pengurus komite yang berpendapat bahwa tetap diajaknya komite sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah pada dasarnya memberikan ruang terbuka terhadap komite sekolah untuk saling bekerja sama dnegan pihak sekolah yang dimana rencana diatur sedemikian rupa yang kemudian komite sekolah dimintai jajak pendapat terkait hal tersebut. Hal ini sesuai kutipan wawancara K sebagai berikut

Komite sekolah tetap diajak dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah disamping itu juga pada dasarnya sekolah memang telah memiliki rencana pengembangan yang sudah diatur sedemikian rupa lalu kemudian komite dimintai pendapat dan melakukan pemantauan walau hanya pada tahap pelaksanaannya saja. Jadi saya rasa memang harus seperti itu, hal-hal yang berkaitan dengan komite dapat langsung dibicarakan bersama tanpa adanya penyekat antara sekolah dan komite karena memang komite juga memiliki tanggung jawab tersendiri terhadap sekolah.

(Wawancara K, F1.D2.d2.P2 2019)

Lebih lanjut yang dikatakan AM selaku Kepala sekolah bahwa “Itu yang pertama-tama kami lakukan, jadi pertama-tama kami duduk bersama komite untuk merencanakan pengembangan sekolah kami yang ada kaitannya dengan komite dan merumuskan apa-apa saja yang akan kami lakukan setelah itu kami sudah mulai mensosialisasikan kepada anggota komite lainnya setelah itu maka program tersebut dijalankan yang dimana sebelumnya telah mendapat masukan-masukan baik itu pendapat dari guru maupun anggota komite sekolah. jadi disini ada kerja sama yang baik antara pihak sekolah dengan komite”.(Wawancara AM, F1.D2.d2.P2 2019). Dari jawaban yang di peroleh dari AM pertama-tama yang dilakukan dalam perencanaan pengembangan sekolah yaitu merumuskan bersama komite sekolah terkait program-program perencanaan pengembangan sekolah yang ada kaitannya dengan komite setelah itu mensosialisasikan kepada pengurus komite melalui rapat untuk dimintai pendapat ataupun masukan baik dari pihak dewan guru beserta pengurus komite yang hadir dalam rapat tersebut.

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara dari berbagai informan komite sekolah sering dimintai pendapat terkait rencana pengembangan sekolah yang terlebih dahulu disusun oleh sekolah yang kemudian meminta umpan balik dari komite terkait perencanaan yang telah disusun, dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah sebab komite sekolah dalam hal ini ikut bertanggung jawab dalam pelaporan RPS, setelah itu mensosialisasikan kepada pengurus komite melalui rapat untuk dimintai

pendapat ataupun masukan baik dari pihak dewan guru beserta pengurus komite yang hadir dalam rapat tersebut.

Hasil observasi yang diperoleh peneliti dilapangan, memberikan gambaran dalam perencanaan program sekolah komite memberikan ide-ide gagasan terkait program sekolah yang akan dilaksanakan sekolah melalui rapat. Sedangkan dari hasil studi dokumentasi, peneliti melihat langsung program kerja sekolah yang dipajang di dalam ruangan kepala sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan menjelaskan bahwa informan komite sekolah sering dimintai pendapat terkait rencana pengembangan sekolah yang terlebih dahulu disusun oleh sekolah yang kemudian meminta umpan balik dari komite terkait perencanaan yang telah disusun, dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah sebab komite sekolah dalam hal ini ikut bertanggung jawab dalam pelaporan RPS, setelah itu mensosialisasikan kepada pengurus komite melalui rapat untuk dimintai pendapat ataupun masukan baik dari pihak dewan guru beserta pengurus komite yang hadir dalam rapat tersebut.

3) Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah

Rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah (RAPBS) didasarkan pada asumsi bahwa sistem penganggaran di sekolah yang dapat menunjukkan keunikan kebutuhan sekolah yang bersifat kooperatif terhadap program-program dan praktik-praktik yang telah berjalanserta membangun hubungan yang lebih baik antara guru dengan orang tua yang dimana dalam hal ini dapat diwujudkan melalui adanya kerja

sama yang transparan terhadap komite sekolah sebagai wadah yang dapat menampung aspirasi orang tua/wali peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara RP selaku Ketua komite sekolah yang memberikan jawaban bahwa:

Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sepenuhnya kan dikelola oleh pihak sekolah itu sendiri termasuk penggunaan dan bos, komite sekolah membantu sedikit demi sedikit saja baik dari segi ide atau gagasan terkait pengalokasian dananya yang memang sekarang dibatasi juga dengan aturan-aturan pemerintah komite juga sewaktu-waktu memberikan bantuan dana yang berasal dari sumbangan orang tua yang dimana kami tidak menentukan berapa banyaknya mereka hanya membantu seikhlasnya saja untuk sekolah.
(Wawancara RP, F1.D2.d3.P3 2019)

Berdasarkan hasil wawancara RP menerangkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sepenuhnya dikelola oleh pihak sekolah termasuk penggunaan dana BOS, komite sekolah hanya membantu dari segi pemikiran atau ide mengenai pengalokasian dana, selain itu komite sekolah menjadi wadah untuk mengumpulkan sumbangsi orang tua siswa yang dalam hal ini komite sekolah tidak mematok nominal jumlah uang yang disumbangkan.

Jawaban wawancara yang diberikan oleh AM selaku Kepala sekolah “Tujuan dari hadirnya komite adalah sebagai dewan pertimbangan jadi sekolah memanfaatkan hal tersebut agar komite tetap aktif dan membantu sekolah jadi pada dasarnya kami selalu mengundang komite setiap diadakan pertemuan termasuk mendiskusikan tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Sekolah disini telah merumuskan segala sesuatunya setelah itu barulah diadakan musyawarah terkait hal tersebut bersama komite dan guru-guru”.(Wawancara AM, F1.D2.d3.P3 2019).

Jawaban AM menerangkan komite sekolah tetap aktif dan membantu sekolah yang pada dasarnya selalu mengundang komite setiap diadakannya pertemuan termasuk mendiskusikan tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang dimana sekolah terlebih dahulu merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah lalu dimusyawarakan bersama guru dan pengurus komite sekolah.

Sejalan dengan dengan hasil wawancara AM peneliti kemudian melakukan wawancara terhadap SH selaku Sekretaris komite sekolah di SMP Negeri 33 Makassar yang mengemukakan pendapatnya bahwa:

Peran kontrolnya komite dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah disini komite sekolah bertindak mengawasi bagaimana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah apakah sesuai dengan yang telah dilaporkan dan ditanda tangani oleh komite walaupun ada masalah kekurangan dan lain hal itu kita tetap musyawarakan bersama mencari jalan terbaik supaya dapat tertutupi lalu secara terbuka kita sampaikan kepada orang tua siswa bahwasanya ada hal-hal yang seperti ini disekolah.
(Wawancara SH, F1.D2.d3.P3 2019)

Berdasarkan wawancara SH menjelaskan peran kontrol komite sekolah dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah adalah bertindak mengawasi bagaimana bentuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah apakah telah sesuai dengan peruntukan yang terdapat pada laporan RAPBS yang ditanda tangani oleh komite jika ada masalah ataupun kekurangan yang terdapat maka komite bersama pihak sekolah melakukan musyawarah kembali terkait masalah tersebut agar transparansi dalam RAPBS tetap dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak sekolah. Hal tersebut senada dengan KUS selaku Wakil ketua komite memberikan keterangan yaitu:

Komite hanya melihat dan memeriksa laporan kepala sekolah terkait RAPBS nya kemudian jikalau ada yang tidak sesuai itulah yang akan dimintai pertanggung jawaban kepala sekolah untuk diberikan penjelasan kepada orang tua siswa dan dewan guru.
(Wawancara KUS, F1.D2.d3.P3 2019)

Hasil wawancara KUS menjelaskan komite sekolah hanya bertugas melihat dan memeriksa laporan Kepala sekolah terkait RAPBS yang dimana jika ada sesuatu yang tidak sesuai dalam laporan RAPBS maka pihak komite sekolah berhak meminta pertanggung jawaban kembali kepada pihak sekolah agar dapat menjelaskan kepada orang tua/wali peserta didik agar dalam hal ini transparansi dalam RAPBS tetap nampak dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada K selaku anggota pengurus komite SMP Negeri 33 Makassar memberikan jawaban hasil wawancara sebagai berikut:

Transparansi sekolah terkait rencana anggaran pendapatan belanja sekolah saya rasa sudah cukup bagus, yang dimana ada pelaporan dari pihak sekolah terutama untuk ketua komite jadi komite tetap dilibatkan dalam memusyawarakan hal tersebut seperti kemarin juga pada saat ada sumbangan sukarela dari orang tua siswa untuk membantu dalam pengadaan sarana UNBK, kita kan dituntut oleh pemerintah untuk memfasilitasi siswa dalam hal ini yang dimaksudkan pihak sekolah harus menyiapkan kebutuhan seperti laptop yang memang masih minim jadi semuanya saling merangkul untuk memberikan sumbangsinya agar bagaimana sekolah dapat menambah sedikit demi sedikit sarana tersebut dengan dibantu oleh orang tua siswa melalui komite.
(Wawancara K, F1.D2.d3.P3 2019)

Jawaban K selaku Anggota pengurus komite menjelaskan transparansi sekolah terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) bahwa pihak sekolah melakukan pelaporan terlebih kepada Ketua komite selain itu

sumbangsi yang berasal dari pihak orang tua/wali peserta didik dilakukan semata-mata hanya untuk pemanfaatan pengadaan bantuan sarana UNBK bagi peserta didik yang akan menghadapi ujian tingkat akhir sebab pada dasarnya anggaran dana BOS belum mampu menutupi kebutuhan sekolah secara keseluruhan sebab terkendala oleh beberapa aturan dalam juknis dana BOS.

Dari hasil keseluruhan wawancara dapat disimpulkan bahwa rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sepenuhnya dikelola oleh pihak sekolah termasuk penggunaan dana BOS, komite sekolah hanya membantu dari segi pemikiran atau ide mengenai pengalokasian dana, selain itu komite sekolah menjadi wadah untuk mengumpulkan sumbangsi orang tua siswa yang dalam hal ini komite sekolah tidak mematok nominal jumlah uang yang disumbangkan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa komite sekolah aktif dalam menjalankan perannya sebagai wadah yang mampu menampung aspirasi yang disampaikan oleh orang tua/wali peserta didik. Sedangkan dari hasil studi dokumentasi, yang dimana dalam hal ini berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan melalui catatan proses tanya jawab dalam rapat bersama komite sekolah terkait dengan sumbangsi orang tua/wali peserta didik dalam pengadaan sarana UNBK tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini memperoleh hasil penelitian bahwa rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sepenuhnya dikelola oleh pihak sekolah termasuk penggunaan dana BOS, komite sekolah hanya membantu dari segi

pemikiran atau ide mengenai pengalokasian dana, selain itu dapat dikatakan komite sekolah aktif dalam menjalankan perannya sebagai wadah yang mampu menampung aspirasi yang disampaikan oleh orang tua/wali peserta didik.

B. Pembahasan Penelitian Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah di SMP Negeri 33 Makassar

Dalam uraian berikut akan dipaparkan pembahasan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran *controlling agency* komite sekolah membahas terkait tentang Akuntabilitas dan Transparansi.

Dalam hal ini, peneliti telah menetapkan SMP Negeri 33 Makassar sebagai lokasi penelitian yang akan dikaji secara ilmiah, data dan fakta peran *controlling agency* berdasarkan dari segi Akuntabilitas dan Transparansi sekolah. Peran kontrol komite terhadap Akuntabilitas mencakup hal-hal didalamnya kinerja sekolah, pengembangan mutu sekolah, sumber daya sekolah, dan output sekolah. sedangkan dalam Transparansi peran kontrol komite terkait dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pendidikan, Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

a. Akuntabilitas

Berikut ini peran komite sekolah sebagai pengontrol akuntabilitas pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 33 Makassar.

1) Kinerja sekolah

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002 terkait fungsi komite sekolah mengatakan bahwa komite sekolah dapat “Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kinerja tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan”.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 33 Makassar menunjukkan bahwa dalam mengontrol kinerja sekolah, komite sekolah dalam hal ini hanya mengontrol melalui pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilaporkan pada saat dilakukan rapat bersama antara pihak sekolah dan komite. Komite sekolah, mendampingi sekolah dalam mewujudkan program sekolah dan tidak semua program sekolah dapat dicampur tangani oleh komite, terkait kinerja sekolah peneliti mengungkap bahwa komite sekolah dalam mewujudkan perannya untuk mengontrol kinerja sekolah yaitu dengan cara melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program sekolah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi ide/gagasan kepada pihak sekolah melihat bahwa sekolah harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik sebab pada dasarnya penilaian kinerja sekolah didasarkan pada kepuasan publik.

2) Mutu sekolah

Pendapat (Baedowi, 2015) menjelaskan bahwa didalam mutu pendidikan, perlu adanya pengembangan mutu agar memastikan bahwa mutu suatu sekolah

berjalan dengan baik dan semestinya. Untuk itu, maka perlu diadakannya tim pengembang mutu untuk memastikan tercapainya tujuan sekolah. Tim Pengembang mutu akan mengkaji secara cermat setiap lingkup dengan rinci diantaranya ialah mutu pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan kemampuan profesional, dan dampingan di luar sekolah. Mutu pembelajaran terdiri dari tiga unsur yaitu guru, murid serta kurikulum. Sedangkan pengelolaan sekolah bertujuan untuk melihat kemampuan sekolah untuk merealisasikan visi dan misi kedalam kegiatan-kegiatan sekolah. Pengembangan kemampuan profesional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan setiap sumber daya yang ada disekolah. Dampingan diluar sekolah bertujuan untuk menumbuhkan minat dan bakat siswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dihimpun menunjukkan bahwa dalam mengontrol mutu sekolah komite sekolah diberikan wewenang untuk ikut dalam program pengembangan mutu sekolah tetapi dalam hal ini komite sekolah hanya diundang sebagai pelengkap saja selebihnya segala sesuatunya telah dipersiapkan oleh sekolah kemudian komite sekolah ikut menyetujui sebab adanya kesulitan-kesulitan yang mungkin pihak sekolah beranggapan bahwa untuk mengumpulkan pengurus komite sangatlah sulit melihat dari adanya kesibukan masing-masing dari pengurus komite.

3) Sumberdaya sekolah

Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 75 Pasal 3 Tahun 2016 dimana komite sekolah dapat menggalang dana dan sumber daya

pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Selain dari pada itu, Setiyono (2015) dikutip dari Slamet (2005:6) Tujuan utama transparansi dan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya yang dimana penyelenggaraannya harus memahami bahwa sekolah harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik sebab pada dasarnya penilaian kinerja sekolah didasarkan pada kepuasan publik. Selain dari pada itu, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa “Sumber daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan komite sekolah sumber daya sekolah dalam hal saran dan prasarana komite sekolah memutuskan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan cara bersama-sama meninjau mencari jalan keluar agar bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana sekolah tetap terpenuhi dalam rangka menunjang proses belajar siswa. Ketua komite dalam hal ini, sering hadir dalam rapat yang diadakan sekolah terutama wakil dan sekretaris komite yang tidak lain merupakan tenaga pengajar di SMP Negeri 33 Makassar sekaligus juga adalah orang tua/wali dari salah satu siswa yang dapat lebih mempermudah secara tidak langsung dapat mengontrol sumberdaya sekolah.

Maka setiap kegiatan itu harus dilaporkan dan dimintai pertanggung jawaban secara tertulis kepada pihak komite sekolah termasuk didalamnya pengelolaan dari

sumberdaya sekolah maka pihak sekolah melaporkan secara transparan sesuai pertanggung jawabannya masing-masing selain dari pada itu, dalam aspek akuntabilitas sumberdaya sekolah komite sekolah selain mengontrol memberikan pula bantuan secara *finacial* terhadap pihak sekolah.

4) Output pendidikan

Pendapat (Danim, 2006) menyatakan bahwa “hasil (*output*) pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler”. Kinerja Komite Sekolah terkait dengan perannya sebagai badan pengontrol (*Controlling Agency*) Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Jakarta Pusat (<https://dpiip.wordpress.com>) menguraikan bahwa komite sekolah dapat “Mengontrol output pendidikan, yang melaksanakan fungsi manajemen pendidikan sebagai badan komite harus dapat memantau hasil ujian akhir, memantau angka partisipasi sekolah, memantau angka mengulang, serta angka bertahan di sekolah”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti adanya hubungan baik antara komite sekolah dan pengelola sekolah, komite melakukan *controlling* terhadap akuntabilitas output sekolah hanya melalui ikatan alumni peserta didik mengontrol informasi lulusan dari siswa ke siswa selain itu dalam pelaksanaan evaluasi atau dalam hal ini

pelaksanaan ujian pihak sekolah dan komite selalu melaksanakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan ujian para peserta didik membahas seberapa jauh kesiapan sekolah dalam melaksanakan ujian hingga sampai pada tingkat pencapaian kriteria kelulusan siswa.

Mengontrol output pendidikan, yang melaksanakan fungsi manajemen pendidikan sebagai badan komite harus dapat memantau hasil ujian akhir, memantau angka partisipasi sekolah, memantau angka mengulang, serta angka bertahan di sekolah dari hasil wawancara dari beberapa informasi menunjukkan bahwa komite sekolah dilibatkan dalam proses persiapan pelaksanaan UNBK tepatnya lebih kepada membantu sekolah melakukan pengadaan sarana peralatan komputer melalui penggalangan dana dari orang tua siswa.

b. Transparansi

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekolah

Menurut teori yang diuraikan oleh Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Jakarta Pusat (<https://dpip.wordpress.com>) menguraikan bahwa kinerja Komite Sekolah terkait dengan perannya sebagai badan pengontrol (*Controlling Agency*), sejalan dengan pelaksanaannya didasarkan pada fungsi manajemen pendidikan yang dalam hal ini diantaranya terkait pelaksanaan program sekolah, yang mencakup tentang hal ini adalah mengontrol organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran untuk

pelaksanaan program sekolah, memantau sumber daya pelaksana program, dan memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di sekolah sering dilakukan rapat bersama dalam pengambilan keputusan dan dengan sepengetahuan dari pihak orang tua siswa. Sekolah meminta jajak pendapat kepada komite sekolah terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di sekolah sebab komite disini juga dilibatkan dalam pelaksanaan program kami sesuai dengan tujuan dari program yang telah buat bersama-sama dengan komite membahas hal-hal yang perlu dikembangkan seperti misalnya pelaksanaan UNBK yang diskusikan bersama-sama bagaimana sekolah melaksanakan kegiatan itu dengan didukung sumber daya sarana.

Mengontrol pelaksanaan program sekolah, yang mencakup tentang hal ini adalah mengontrol organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, memantau sumber daya pelaksana program, dan memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah. Sedangkan hasil wawancara terhadap berbagai informan di SMP Negeri 33 Makassar menunjukkan bahwa pihak sekolah hanya sekedar mengundang pengurus komite sekolah dalam sebuah pertemuan guna membahas pelaksanaan program dan kegiatan sekolah.

2) Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Djam'an Satori menyebutkan bahwa komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal

yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah (Mulyono,2014:258). Selain itu, dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”. Adapun yang dikemukakan (Muhi, 2012) Keterlibatan komite sekolah dapat diupayakan tidak hanya dalam bentuk dana yang dapat diserap, tetapi juga kepedulian dan perhatian/rapat dan mematuhi peraturan yang ditertibkam oleh sekolah. Termasuk dalam hal ini, keikutsertaan komite sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Adanya keterlibatan pengurus komite dapat dinilai dari kehadiran rapat pengurus, dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang memerlukan kehadiran mereka, dan keaktifan mereka dalam menjalankan tugas.

Maka dari landasan teori tersebut wawancara hasil penelitian yang diperoleh peneliti, menjelaskan bahwa komite sekolah sering dimintai pendapat terkait rencana pengembangan sekolah yang terlebih dahulu disusun oleh sekolah yang kemudian meminta umpan balik dari komite terkait perencanaan yang telah disusun, dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah sebab komite sekolah dalam hal ini ikut bertanggung jawab dalam pelaporan RAPBS.

Setelah itu, pihak mensosialisasikan kepada pengurus komite melalui rapat untuk dimintai pendapat ataupun masukan baik dari pihak dewan guru beserta pengurus komite yang hadir dalam rapat tersebut dan pihak pengelolah sekolah meminta jajak pendapat kepada komite sekolah. Secara garis besar komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah berdasarkan dari program-program sekolah yang ada kaitannya dengan pihak komite sekolah.

3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Berdasarkan Permudikbud Nomor 75 Pasal 3 Tahun 2016 memperbolehkan komite sekolah untuk meminta bantuan kepada pihak orang tua/wali peserta didik seperti pada kutipan berikut “Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif” yang dalam hal ini tidak bersifat pemaksaan yang tergolong pungutan liar. Selain itu juga, (Agustini, 2013) Dengan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sepenuhnya dikelola oleh pihak sekolah termasuk penggunaan dana BOS, komite sekolah hanya membantu dari segi pemikiran atau ide mengenai pengalokasian dana, selain itu komite sekolah menjadi wadah untuk mengumpulkan sumbangsi orang tua siswa yang dalam hal ini komite sekolah tidak mematok nominal jumlah uang yang disumbangkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil penelitian tentang Peran *controlling agency* komite sekolah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di SMP Negeri 33 Makassar dapat di simpulkan bahwa dalam aspek akuntabilitas, komite sekolah melakukan pengontrolan pada setiap kegiatan sekolah diantaranya terkait kinerja sekolah, mutu sekolah, sumberdaya sekolah dan output sekolah. Kemudian dalam aspek transparansi, komite sekolah mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan sekolah, mengontrol setiap rapat sekolah yang membahas tentang penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS), dan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), serta penggalangan partisipasi masyarakat baik berupa ide/gagasan hingga sampai pada bantuan yang berbentuk *financial*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pembahasan dan kesimpulan Penelitian maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Komite sekolah di SMP Negeri 33 Makassar, diharapkan untuk tetap meningkatkan perannya sebagai *controlling agency* dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, guna untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
2. Bagi Kepala SMP Negeri 33 Makassar, agar tetap bekerjasama dengan Komite sekolah sebagai pengontrol Akuntabilitas dan Transparansi sekolah. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu sekolah.
3. Bagi peneliti agar diberikan kritikan yang sifatnya membangun, terkait penyusunan Skripsi yang telah dibuat, untuk melengkapi kekurangan dan memperbaiki kekeliruan dalam penulisannya. Semoga hasil penelitian ini dapat melahirkan penelitian lanjutan baik menggunakan metode Kuantitatif atau Kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N. (2016). Kinerja Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri Sampangan No. 26. *Naskah Pustaka*. Hal.7
- Agustini. (2013). Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten wonosobo. *Agustini*, 48-49.
- Baedowi, A. (2015). *Manajemen Sekolah Efektif*. Tangerang: Pustaka Alvabert.
- Danim, S. (2006). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah*. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003. Hal. 11-12
- Emelda, W. (2018). Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Gugus SD Negeri Lambada Klien Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- Fauziah, H. (2018). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 3 Cisauk. *Respository uinjkt.ac.id*.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryanto, Agus. dkk. (2008). *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospekmya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Lugtyastyono. (n.d.). *Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah*. Retrieved Juli Sabtu, 2019, from [lugtyastyono60.wordpress.com: https://lugtyastyono60.wordpress.com/pedoman-penilaian-kinerja-kepala-sekolah/](https://lugtyastyono60.wordpress.com/pedoman-penilaian-kinerja-kepala-sekolah/)

- Mardiasmo. (2006). *Pengertian Akuntabilitas Menurut Para Ahli*. Retrieved Juli 29, 2019, from <https://www.seputarpengetahuan.co.id>
- Mulyono, W. D. (2014). Peran Komite Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. *Komite Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyasa. (2011). *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa. (2011). *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2011). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Rosda Karya. Hal. 120.
- Muhi, A. H. (2012). Eksistensi Komite Sekolah.
- Mulyadi, M. (2018). Peran Komite Dalam Pelayanan Peningkatan Mutu Pendidikan Di MAN 1 PIDIE. Hal.23-27.
- Noris, I. A. (2017). Inspirasi Manajemen Pendidikan. *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Layanan Jasa Pendidikan Di SMP Negeri 12*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Rohiat. (2008). *Manajemen Sekolah; Teori Dasar Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sangki, A. A. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah. *E-Jurnal UNSRAT*.
- Sinring, A. (2012). *Pedoman Penulisan Skripsi Program SI*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Sirajuddin. (2016). Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SDN 124 Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng . Respository.uin-alaudding.ac.id.
- Siagian, S. P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tim Pengembangan Komite Sekolah (2016). Pengembangan Komite. Jakarta Pusat: Ditjen Dikdasmen Depdiknas.

Undang-undang Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Utomo, E. (2017, April Senin). *Fungsi Dan Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Retrieved Juli Sabtu, 2019, from Pendidikan: <http://edyutomo.com>

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul : Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas di SMP Negeri 33 Makassar

FOKUS PENELITIAN	DIMENSI	DESKRIPTOR	SUMBER DATA
Peran <i>Controlling Agency</i> Komite Sekolah	Akuntabilitas	1) Kinerja Sekolah 2) Mutu Sekolah 3) Sumberdaya Sekolah 4) Output Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Terstruktur • Observasi • Dokumentasi
	Transparansi	4) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekolah 5) Penyusunan Rencana Program Sekolah (RPS) 6) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Terstruktur • Observasi • Dokumentasi

KETUA KOMITE

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN CONTROLLING AGENCY KOMITE SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR

Nama Lengkap :
NIP :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

➤ **Akuntabilitas**

- 1) Peran komite sekolah salah satunya adalah sebagai pengontrol akuntabilitas kinerja sekolah, menurut Bapak/Ibu sudahkah Bapak/Ibu menjalankan peran tersebut dengan baik ?
- 2) Apa yang dilakukan komite sekolah dalam menjalankan perannya untuk mengontrol akuntabilitas terhadap pengembangan mutu sekolah ?
- 3) Bagaimana peran kontrol yang dilakukan komite sekolah terhadap akuntabilitas sumber daya sekolah ?
- 4) Penelusuran apa yang sering dilakukan komite dan pihak sekolah terkait akuntabilitas terhadap output sekolah ?

➤ **Transparansi**

- 1) Apakah selama masa pengabdian Bapak/Ibu sebagai anggota komite sekolah sering dilakukannya jajak pendapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan ?
- 2) Apakah sekolah sering melibatkan Bapak/Ibu dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah ?
- 3) Bagaimana peran kontrol komite sekolah dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ?

WAKIL KETUA KOMITE

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN CONTROLLING AGENCY KOMITE SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR

Nama Lengkap :
NIP :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

a. Akuntabilitas

- 1) Peran komite sekolah salah satunya adalah sebagai pengontrol akuntabilitas kinerja sekolah, menurut Bapak/Ibu apa yang telah dilakukan komite terkait peran tersebut agar dapat terlaksana ?
- 2) Apa yang dilakukan komite sekolah dalam menjalankan perannya untuk mengontrol akuntabilitas terhadap pengembangan mutu sekolah ?
- 3) Apakah komite sekolah sering melakukan peran kontrol terhadap akuntabilitas sumber daya sekolah ?
- 4) Apakah Bapak/Ibu melakukan penelusuran bersama komite sekolah terkait akuntabilitas terhadap output sekolah ?

b. Transparansi

- 1) Apakah selama masa pengabdian Bapak/Ibu sebagai anggota komite sekolah sering dilakukannya jajak pendapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan ?
- 2) Apakah sekolah sering melibatkan Bapak/Ibu dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah ?
- 3) Bagaimana peran kontrol komite sekolah dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ?

SEKRETARIS KOMITE

PEDOMAN WAWANCARA

**PERAN CONTROLLING AGENCY KOMITE SEKOLAH DALAM
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR**

Nama Lengkap :
NIP :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

➤ **Akuntabilitas**

- 1) Peran komite sekolah salah satunya adalah sebagai pengontrol akuntabilitas kinerja sekolah, menurut Bapak/Ibu sudahkah Bapak/Ibu menjalankan peran tersebut dengan baik ?
- 2) Apa yang dilakukan komite sekolah dalam menjalankan perannya untuk mengontrol akuntabilitas terhadap pengembangan mutu sekolah ?
- 3) Bagaimana peran kontrol yang dilakukan komite sekolah terhadap akuntabilitas sumber daya sekolah ?
- 4) Penelusuran apa yang sering dilakukan komite dan pihak sekolah terkait akuntabilitas terhadap output sekolah ?

➤ **Transparansi**

- 1) Apakah selama masa pengabdian Bapak/Ibu sebagai anggota komite sekolah sering dilakukannya jajak pendapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan ?
- 2) Apakah sekolah sering melibatkan Bapak/Ibu dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah ?
- 3) Bagaimana peran kontrol komite sekolah dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ?

ANGGOTA KOMITE

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN CONTROLLING AGENCY KOMITE SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR

Nama Lengkap :

NIP :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

➤ **Akuntabilitas**

- 1) Peran komite sekolah salah satunya adalah sebagai pengontrol akuntabilitas kinerja sekolah, menurut Bapak/Ibu sudahkah Bapak/Ibu menjalankan peran tersebut dengan baik ?
- 2) Apa yang dilakukan komite sekolah dalam menjalankan perannya untuk mengontrol akuntabilitas terhadap pengembangan mutu sekolah ?
- 3) Bagaimana peran kontrol yang dilakukan komite sekolah terhadap akuntabilitas sumber daya sekolah ?
- 4) Penelusuran apa yang sering dilakukan komite dan pihak sekolah terkait akuntabilitas terhadap output sekolah ?

➤ **Transparansi**

- 1) Apakah selama masa pengabdian Bapak/Ibu sebagai anggota komite sekolah sering dilakukannya jajak pendapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan ?
- 2) Apakah sekolah sering melibatkan Bapak/Ibu dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah ?
- 3) Apakah pihak sekolah sering melakukan musyawarah dengan komite sekolah untuk rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah?

KEPALA SEKOLAH

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN CONTROLLING AGENCY KOMITE SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR

Nama Lengkap :
 NIP :
 Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

a. Akuntabilitas

- 1) Peran komite sekolah salah satunya adalah sebagai pengontrol akuntabilitas kinerja sekolah, menurut Bapak/Ibu apa yang telah dilakukan komite terkait peran tersebut agar dapat terlaksana ?
- 2) Apa yang telah dilakukan komite sekolah untuk menjalankan perannya dalam mengontrol akuntabilitas terhadap pengembangan mutu sekolah ?
- 3) Apakah komite sekolah sering melakukan peran kontrol terhadap akuntabilitas sumber daya ?
- 4) Apakah Bapak/Ibu sering melakukan penelusuran bersama komite sekolah terkait akuntabilitas terhadap output sekolah ?

b. Transparansi

- 1) Apakah komite sekolah dimintai jajak pendapat terkait pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di sekolah ?
- 2) Apakah Bapak/Ibu sering melibatkan komite sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah ?
- 3) Apakah pihak sekolah sering melakukan musyawarah dengan komite sekolah terkait rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ?

PEDOMAN OBSERVASI

PERAN CONTROLLING AGENCY KOMITE SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR

No.	Hal-hal Yang Diamati	Observasi	
		Perilaku/Keadaan	
		Ya	Tidak
1.	Prestasi-prestasi yang diperoleh sekolah melalui lomba yang diikuti Siswa dan Guru		
2.	Kelengkapan saran dan prasarana sekolah		
3.	Keterlibatan komite dalam rapat kegiatan sekolah		
4.	Proses Persiapan Pelaksanaan UNBK		
5.	Laporan hasil kegiatan sekolah		
6.	Laporan agenda catatan hasil rapat komite		
	Laporan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)		

PEDOMAN HASIL OBSERVASI
PERAN CONTROLLING AGENCY KOMITE SEKOLAH DALAM
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR

No	Hal-hal Yang Diamati	Observasi		
		Perilaku/Keadaan		
		Ya	Tdk	Keterangan
1.	Prestasi-prestasi yang diperoleh sekolah melalui lomba yang diikuti Siswa dan Guru	√		Peneliti mengamati bahwa prestasi-prestasi yang diraih oleh sekolah bukan hanya berasal dari peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
2.	Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah	√		Hasil observasi yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana di SMP Negeri 33 Makassar telah cukup memadai. Dilihat juga dari profil data arsip sarana dan prasana.
3.	Keterlibatan komite dalam rapat kegiatan sekolah	√		observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa komite sekolah berperan aktif dalam setiap rapat yang dilaksanakan oleh sekolah dapat dilihat dalam daftar hadir pengurus komite yang terdapat dalam buku agenda komite sekolah
4.	Proses Persiapan Pelaksanaan UNBK	√		Hasil observasi yang diperoleh peneliti dilapangan memperlihatkan bahwa komite sekolah melakukan kerjasama dengan sekolah dalam persiapan pelaksanaan UNBK , selain itu komite sekolah mengontrol lulusan sekolah bekerjasama dengan guru BK.
5.	Laporan hasil kegiatan sekolah	√		Sebelum dan sesudah dilaksanakannya program

				sekolah komite sekolah dan kepala sekolah selalu melakukan koordinasi sebab dalam pelaporan hasil kegiatan komite ikut bertanggung jawab.
6.	Laporan agenda catatan hasil rapat komite	√		Hasil observasi yang diperoleh peneliti dilapangan, memberikan gambaran dalam perencanaan program sekolah komite memberikan ide-ide gagasan terkait program sekolah yang akan dilaksanakan sekolah melalui rapat.
7.	Laporan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)	√		Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa komite sekolah aktif dalam menjalankan perannya sebagai wadah yang mampu menampung aspirasi yang disampaikan oleh orang tua/wali peserta didik.

LAMPIRAN 2

Matriks Analisis Data

Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di SMP Negeri 33 Makassar

KET : F = Fokus

D = Dimensi

d = deskriptor

P = Pertanyaan

Sub Fokus	Hasil Wawancara	Catatan Observasi	Dokumentasi dan Teori Yang Mendukung
Peran Akuntabilitas Controlling Agency Komite Sekolah	<p>RP, F1.D1.d1.P1</p> <p>Komite sekolah menjalankan perannya dalam mengontrol kinerja sekolah itu melalui pelaksanaan program sekolah kami memantau dari segi pelaksanaannya saja sebab komite sekolah tidak boleh terlalu jauh menaungi hal-hal terkait sekolah karena pada dasarnya kami hanya melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan komite seperti pada saat pelaksanaan UNBK kemarin kita diundang membicarakan persiapan kegiatan tersebut.</p> <p>KUS, F1.D1.d1.P1</p> <p>Menurut saya sebagai komite sekolah harusnya kan semua kegiatan-kegiatan sekolah harus bekerja sama dengan</p>	<p>Pada Hari Senin, 29 April 2019, Peneliti datang ke SMP Negeri 33 Makassar untuk melakukan penelitian tentang peran <i>controlling agency</i> komite sekolah. Pada saat itu peneliti mengutarakan maksud keinginan peneliti untuk mengadakan penelitian di SMP Negeri 33 Makassar dengan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian agar lebih memperjelas apa yang akan dilakukan peneliti selama dilapangan. Peneliti disambut oleh Wakil Komite sekolah SMP Negeri 33 Makassar</p>	<p>Selain observasi peneliti juga melakukan studi dokumentasi yang terkait dengan Akuntabilitas sekolah berdasarkan buku agenda komite. Adapun teori pendukung dalam hal ini Mulyasa (2011: 128-129) bahwa fungsi komite sekolah Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Sekolah mengenai : Kebijakan dan Program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBM),</p>

	<p>komite sekolah tapi selama ini fungsi yang dimaksud (Kontrol) biasanya hanya sebagai simbol saja jadi peran komite disini tidak terlalu dilibatkan hanya sekedar apa namanya, penyampaian bahwa ada program sekolah yang seperti ini harusnya kan misalnya mulai dari penyusunan RAPBS dilibatkan. Kemudian setelah itu, masuk program sekolah apa-apa yang dibutuhkan oleh sekolah, apa-apa yang dibutuhkan oleh sekolah semua harusnya di sharing kepada komite namun untuk saat ini belum maksimal dilaksanakan.</p> <p>SH, F1.D1.d1.P1</p> <p>Peran kontrol komite terhadap akuntabilitas kinerja sekolah dilaksanakan dimana pihak sekolah sudah menyusun sedemikian rupa kemudian komite hanya mengamati kembali setiap program yang telah direncanakan tetapi kemudian komite juga tetap ada pertimbangan-pertimbangan terkait hal tersebut yang intinya adalah sekolah sudah mempersiapkan lalu kemudian bersama komite berpartisipasi dalam menyetujuinya.</p> <p>KA, F1.D1.d1.P1</p>	<p>dengan baik dan ramah. Pada tanggal 30 April 2019 peneliti mulai melakukan wawancara sekaligus melakukan observasi terkait peran <i>controlling agency</i> komite sekolah terkait akuntabilitas pelaksanaan peran kontrol komite. Peneliti melihat daftar nama pengurus komite yang pada dasarnya aktif dalam kegiatan komite termasuk yang selalu hadir dalam rapat bersama, dengan pihak sekolah dan guru serta bersama orang tua siswa .</p>	<p>Kriteria Kinerja Sekolah, Kriteria Tenaga Kependidikan, Kriteria Fasilitas Pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.</p>
--	---	--	--

	<p>Selama ini sepengetahuan saya, sekolah selalu melakukan pertemuan dengan komite sekolah untuk membahas hal-hal yang juga ada kaitannya dengan komite. Saya lihat bahwa apa yang dilakukan sekolah sudah berjalan bagus terbukti disana itu banyak prestasi-prestasi yang didapatkan seperti yang dilihat disana banyak piala-piala disamping itu banyak kegiatan ekstra kurikulumnya dan lumayanlah secara kasat mata itu yang dapat kita lihat bersama-sama.</p> <p>AM, F1.D1.d1.P1</p> <p>Peran kontrol kinerja yang dilakukan komite sekolah yaitu dengan memantau melalui pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilaporkan setiap dilakukannya pertemuan bersama antara pihak sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa.</p> <p>RP, F1.D1.d2.P2</p> <p>Terkait dengan pengontrolan akuntabilitas terhadap pengembangan mutu sekolah itu dilakukan dengan cara melihat riwayat prestasi peserta didik secara periodik baik secara akademik maupun non akademik sekaligus dari laporan-laporan yang diperbincangkan pada saat dilakukannya pertemuan antara pihak sekolah, guru dan</p>		<p>(Baedowi, 2015) menjelaskan bahwa didalam mutu pendidikan, perlu adanya pengembangan mutu agar memastikan bahwa mutu suatu sekolah berjalan dengan baik dan semestinya. Untuk itu, maka perlu diadakannya tim pengembang mutu untuk memastikan tercapainya tujuan sekolah. Tim</p>
--	--	--	---

	<p>orang tua siswa. KUS, F1.D1.d2.P2</p> <p>Dalam pengembangan mutu komite sekolah, komite diberi wewenang untuk mengontrol tentang perkembangan sejauh mana mutu sekolah tapi kembali lagi bahwa rata-rata komite sekolah itu hanya diundang sebagai pelengkap saja istilahnya sudah barang jadi baru diberikan kepada pihak komite sehingga peran komite sekolah dalam hal peningkatan mutu itu sebenarnya sangat besar peranannya cuma itu tadi karena berbagai unsur dan kesulitan-kesulitan mungkin biasanya sekolah menganggap bahwa untuk mengumpulkan pengurus komite ini sulit sehingga konsep-konsep yang disodorkan dari sekolah ke komite ya tinggal komite menyetujui saja harusnya kan semua unsur komite harus mempertimbangkan juga kekurangannya dimana dan mana yang perlu dikembangkan.</p> <p>SH, F1.D1.d2.P2</p> <p>Jadi, itu dimulai dengan perencanaan dan pelaksanaan program sekolah seperti juga kegiatan ekstrakurikuler kami melihat perkembangan siswa melalui itu,</p>		<p>Pengembang mutu akan mengkaji secara cermat setiap lingkup dengan rinci diantaranya ialah mutu pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan kemampuan profesional, dan dampingan di luar sekolah. Mutu pembelajaran terdiri dari tiga unsur yaitu guru, murid serta kurikulum. Sedangkan pengelolaan sekolah bertujuan untuk melihat kemampuan sekolah untuk merealisasikan visi dan misi kedalam kegiatan-kegiatan sekolah. Pengembangan kemampuan profesional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan setiap sumber daya yang ada disekolah. Dampingan diluar sekolah bertujuan untuk menumbuhkan minat dan bakat siswa.</p>
--	--	--	--

	<p>partisipasi dalam perlombaan, pencapaian prestasi akademik siswa hal itu semua dapat terpantau ketika diadakannya rapat.</p> <p>AM, F1.D1.d2.P2</p> <p>Pada dasarnya setiap hal-hal yang berkenaan dengan mutu sekolah komite sekolah berpartisipasi bukan hanya memberikan bantuan berwujud material saja, tetapi juga membantu memberikan ide-ide, pemikiran, dan tindakan-tindakan inovatif.</p> <p>K, F1.D1.d2.P2</p> <p>Mutu sekolah sejauh dari pengamatan saya sebagai anggota komite cukup bagus karena secara periodik itu melakukan sosialisasi kepada siswa dan termasuk orang tua/wali untuk memberikan motivasi kepada anak-anak sebab disamping tanggung jawab sekolah diluar sekolah juga diharapkan bagaimana orang tua ini dapat memberikan motivasi jadi antara sekolah dan orang tua dapat sejalan jadi melalui hal tersebut ada kerja sama yang baik antara sekolah dan orang tua dalam hal ini termasuk komite didalamnya. Hal tersebut dapat berpengaruh juga terhadap eksistensi sekolah di ruang publik.</p>		Permendikbud Nomor 75
--	---	--	-----------------------

	<p>RP, F1.D1.d3.P3 Dilihat dari segi sumber daya sekolah dalam hal ini sarana dan prasarana memang sangat-sangat terbatas juga sehingga komite memutuskan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah bersama-sama meninjau mencari jalan keluarnya apa yang menjadi hambatan terhadap proses belajar mengajar di sekolah dengan cara seperti ini ya saya kira bukan hanya sekedar mengontrol saja.</p> <p>KUS, F1.D1.d3.P3 Setiap kegiatan itu harus dilaporkan dimintai pertanggung jawaban secara tertulis terkait hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah itu dilaporkan kepada komite secara terbuka dan transparan.</p> <p>SH, F1.D1.d3.P3 Komite dalam hal ini secara berkala hadir disekolah terutama ketua komite bersama wakilnya dan sekretaris juga saling bekerja sama terutama kan wakil dan sekretaris itu berasal dari lingkungan sekolah dalam hal ini guru yang kebetulan juga salah satu orang tua siswa disini, jadi secara tidak langsung dapat</p>		<p>Pasal 3 Tahun 2016 dimana komite sekolah dapat menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.</p> <p>Setiyono (2015) dikutip dari Slamet (2005:6) Tujuan utama transparansi dan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya yang dimana penyelenggaraannya harus memahami bahwa sekolah harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik sebabpada dasarnya</p>
--	--	--	---

	<p>mengontrol hal tersebut ketika ada rapat guru mengenai sumber daya sekolah otomatis kita juga mengetahui hal tersebut serta dapat mengontrol langsung sumber-sumber daya sekolah walau bukan ketua yang melakukan itu tetapi nantinya juga kita saling menginformasikan itu semua, seperti pelaksanaan RAPBS, disiplin guru, disiplin tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing itu sudah termasuk kontrolnya komite itu.</p> <p>AM, F1.D1.d3.P3</p> <p>Hubungan sekolah dengan komite saling mendukung satu sama lain terkait sumber daya sekolah sekolah kami bersama komite sekolah selalu bekerja sama setiap tahun dalam persiapan UNBK jadi semua pihak berunding sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, bersama-sama kami mencari jalan tengah merumuskan hal-hal yang perlu ditanggapi seperti sebelumnya yang telah dikatakan bahwa komite membantu kami mencari sumbangsi dana dari orang tua siswa tanpa mematok seberapa banyak yang harus disumbangkan melainkan disini mereka memberikan alakadarnya saja lalu</p>		<p>penilaian kinerja sekolah didasarkan pada kepuasan publik.</p>
--	--	--	---

	<p>kemudian dimanfaatkan untuk pengadaan Komputer.</p> <p>K,F1.D1.d3.P3</p> <p>Kalau akuntabilitasnya itu bagus, saya beberapa kali disampaikan laporan-laporan terutama yang melibatkan komite jadi sekolah memberikan laporan-laporan yang berkaitan dengan sumberdaya sekolah termasuk fasilitas saran dan prasarana, tenaga pendidik hingga sampai pada penggunaan dana sekolah juga yang dimana ada sangkut pautnya dengan komite. Jadi disini komite dapat memantau hal-hal yang tidak berjalan dengan baik ya kita sebagai komite harus melakukan beberapa pertimbangan dan mngoreksi hal tersebut termasuk kemarin fasilitas dalam menghadapi UNBK.</p> <p>RP, F1.D1.d4.P4</p> <p>Jadi kita tetap juga memberikan pengawasan terhadap akuntabilitas output sekolah termasuk pengawasan dari segi proses belajar kita saling berbagi informasi dengan guru selain itu yang sangat penting juga adalah komite sekolah membentuk dan melakukan temu alumni sehingga disitu secara tidak langsung kita dapat mengontrol alumni-</p>		<p>Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Jakarta Pusat (https://dpip.wordpress.com) menguraikan bahwa komite sekolah dapat “Mengontrol output pendidikan, yang melaksanakan fungsi manajemen pendidikan sebagai badan komite harus dapat memantau hasil ujian</p>
--	---	--	---

	<p>alumni sekolah. KUS, F1.D1.d4.P4 Ini yang belum nampak, biasanya yang melakukan itu Guru BK yang biasanya memberikan angket pernyataan kepada siswa yang lulusannya kemudian setelah diterima di sekolah kemudian dikembalikan dan yang sangat penting adalah komite sekolah membentuk ikatan alumni sehingga disitu secara tidak langsung kita dapat mengontrol alumni-alumni kita berada setelah tamat, bekerja dan lain sebagainya. SH, F1.D1.d4.P4 Pertama prestasi-prestasi sekolah dalam mengikuti lomba-lomba baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun dari pihak lain, kemudian hasil ujian nasional siswa, jumlah lulusan yang telah diterima di sekolah-sekolah favorit ya itu kita telusuri semua berapa yang masuk di SMK favorit ya sampai disana kita punya penelusuran itu. AM, F1.D1.d4.P4 Penelusuran terkait output sekolah dilakukan melalui adanya ikatan alumni sekolah selain itu kami bersama komite juga memantau dari siswa dan yang</p>		<p>akhir, memantau angka partisipasi sekolah, memantau angka mengulang, serta angka bertahan di sekolah”.</p>
--	--	--	---

	<p>lainnya terkait dengan lulusan sekolah disini berapa-berapa yang diterima di sekolah unggulan dan lain sebagainya. Jadi sekolah dan komite memiliki hubungan kerjasama yang baik setiap pelaksanaan ujian kami terlebih dahulu melakukan rapat bersama komite membicarakan sekian siswa yang akan ikut ujian.</p> <p>K, F1.D1.d4.P4</p> <p>Berbicara output sekolah dalam hal ini menyangkut lulusan sekolah cukup bagus bahkan beberapa tahun terakhir sekolah SMP Negeri 33 termasuk sekolah unggulan dan menjadi buruan oleh calon peserta didik yang akan lanjut di sekolah menengah pertama. Jadi saya sebagai anggota komite yang dimana juga sebagai orang tua dari salah satu siswa disana memberikan apresiasi yang positiflah terhadap sekolah tersebut</p>		
Peran Transparansi Controlling Agency Komite Sekolah	<p>RP, F1.D2.d1.P1</p> <p>Terkait dengan dimintai jajak pendapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan disekolah itu sering dilakukan</p>	<p>Pada tanggal 30 April 2019 peneliti mulai melakukan wawancara sekaligus melakukan observasi terkait</p>	<p>Selain observasi peneliti juga melakukan dokumentasi dengan meninjau dokumen atau file kelengkapan yang</p>

	<p>dalam hal ini semua unsur dilibatkan bukan hanya komite sekolah tetapi semuanya berkumpul kemudian diambil keputusan bersama tidak terlepas dari sepengetahuan pihak orang tua siswa jadi kita sama-sama berunding dan hasil keputusannya kita sepakati bersama. KUS, F1.D2.d2.P1</p> <p>Kalau itu sering, cuman ya maksudnya jajak pendapatnya itu semua unsur dilibatkan bukan hanya komite sekolah tetapi semuanya berkumpul kemudian diambil keputusan bersama, misalnya pelaksanaan UNBK dan perlu adanya pengadaan komputer diundanglah komite sekolah guru-guru dan berbicara bahwa apa yang dibutuhkan sekolah adalah lalu kemudian dilemparlah ke orang tua siswa untuk sama-sama berunding dan hasil keputusan itulah yang terjadi SH, F1.D2.d2.P1</p> <p>Ya seringlah karena kebetulan kita juga termasuk orang disekolah kadang-kadang kita diskusi atau sharing dengan teman-teman guru terkait dengan program sekolah hal-hal yang perlu dikembangkan seperti apa dan lain sebagainya seperti misalnya pelaksanaan UNBK ya itu kita</p>	<p>peran <i>controlling agency</i> komite sekolah terkait Transparansi dalam pelaksanaan peran kontrol komite. Peneliti melihat daftar nama pengurus komite yang pada dasarnya aktif dalam kegiatan komite termasuk yang selalu hadir dalam rapat bersama, dengan pihak sekolah dan guru serta bersama orang tua siswa .</p>	<p>berkaitan dengan Transparansi sekolah. Peneliti melakukan studi dokumentasi dari Buku Agenda komite, rencana strategi (Renstra), RKAS, Dokumen sekolah, dan program-program sekolah.</p> <p>Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Jakarta Pusat (https://dpip.wordpress.com) menguraikan bahwa kinerja Komite Sekolah terkait dengan perannya sebagai badan pengontrol (<i>Controlling Agency</i>), sejalan dengan pelaksanaannya didasarkan pada fungsi manajemen pendidikan yang dalam hal ini diantaranya terkait pelaksanaan program sekolah, yang mencakup tentang hal ini adalah mengontrol organisasi sekolah, memantau penjadwalan program</p>
--	--	--	---

	<p>diskusikan bersama-sama bagaimana sekolah melaksanakan kegiatan itu dengan didukung sumber daya sarana yang memadai seperti kebutuhan komputer yang akan digunakan dan bagaimana kita bisa sediakan itu untuk siswa dalam hal ini juga tidak terlepas dari sepengetahuan orang tua siswa kita tetap diskusikan itu sama-sama.</p> <p>AM, F1.D2.d2.P1</p> <p>Kami sering meminta jajak pendapat kepada komite sekolah terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di sekolah sebab komite disini juga dilibatkan dalam pelaksanaan program kami sesuai dengan tujuan dari program yang kita buat bersama-sama dengan komite.</p> <p>K, F1.D2.d1.P1</p> <p>Kita secara langsung ikut dalam rapat dan diberikan kesempatan untuk berpendapat terkait hal tersebut. Belum lama ini, sebelum pelaksanaan UNBK kemarin kita pihak komite sekolah dipanggil untuk menghadiri rapat bersama Kepala sekolah, dewan guru termasuk didalamnya orang tua siswa yang akan mengikuti ujian untuk membahas</p>		<p>sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, memantau sumber daya pelaksana program, dan memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.</p> <p>Djam'an Satori menyebutkan bahwa komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah (Mulyono,2008:258). Selain</p>
--	---	--	---

	<p>persiapan serta kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan UNBK. RP, F1.D2.d2.P2 Kalau ditinjau dari sisi transparansi sekolah saya rasa pihak sekolah sudah terbuka terhadap kami dan komite juga tidak bisa terlalu jauh ikut campur urusan sekolah karena kita masing-masing memiliki batasan baik dari pihak komite ataupun pihak sekolah. Jadi disini, komite hanya dimintai pendapat terkait rencana pengembangan sekolah yang terlebih dahulu disusun oleh sekolah lalu kemudian meminta umpan balik dari kami terkait apa-apa saja yang ada didalamnya. KUS, F1.D2.d2.P2 Saya rasa itu relatif setiap sekolah berbeda ada yang dilibatkan dan ada juga yang tidak, kalau disekolah ini rencana yang sudah matang kita pihak sekolah tinggal melihat dan mempertimbangkan bahwa ya ini memang yang kita butuhkan kemudian dilaporkan. SH, F1.D2.d2.P2 Tentunya pihak sekolah melibatkan komite sekolah dalam hal penyusunan rencana pengembangan sekolah</p>		<p>itu, dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”. Maka dari landasan teori tersebut wawancara hasil penelitian yang diperoleh.</p>
--	--	--	---

	<p>dikarenakan komite ikut andil dalam memikirkan secara bersama-sama untuk menentukan hal terbaik bagi sekolah termasuk apa yang menjadi kekurangan sekolah dan mana yang perlu dikembangkan lagi, semua itu haruslah dibutuhkan juga pertimbangannya komite dan saya rasa itu sudah termasuk secara langsung mengontrol penyusunan pengembangan yang ada disekolah sekolah.</p> <p>AM, F1.D2.d2.P2</p> <p>Itu yang pertama-tama kami lakukan, jadi pertama-tama kami duduk bersama komite untuk merencanakan pengembangan sekolah kami yang ada kaitannya dengan komite dan merumuskan apa-apa saja yang akan kami lakukan setelah itu kami sudah mulai mensosialisasikan kepada anggota komite lainnya setelah itu maka program tersebut dijalankan yang dimana sebelumnya telah mendapat masukan-masukan baik itu pendapat dari guru maupun anggota komite sekolah. jadi disini ada kerja sama yang baik antara pihak sekolah dengan komite</p> <p>K, F1.D2.d2.P2</p>		<p>Permudikbud Nomor 75 Pasal 3 Tahun 2016 memperbolehkan komite sekolah untuk meminta bantuan kepada pihak orang tua/wali peserta didik seperti pada kutipan berikut “Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif</p>
--	---	--	---

	<p>Komite sekolah tetap diajak dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah disamping itu juga pada dasarnya sekolah memang telah memiliki rencana pengembangan yang sudah diatur sedemikian rupa lalu kemudian komite dimintai pendapat dan melakukan pemantauan walau hanya pada tahap pelaksanaannya saja. Jadi saya rasa memang harus seperti itu, hal-hal yang berkaitan dengan komite dapat langsung dibicarakan bersama tanpa adanya penyekat antara sekolah dan komite karena memang komite juga memiliki tanggung jawab tersendiri terhadap sekolah.</p> <p>RP, F1.D2.d2.P3</p> <p>Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sepenuhnya kan dikelola oleh pihak sekolah itu sendiri termasuk penggunaan dan bos, komite sekolah membantu sedikit demi sedikit saja baik dari segi ide atau gagasan terkait pengalokasian dananya yang memang sekarang dibatasi juga dengan aturan-aturan pemerintah komite juga sewaktu-waktu memberikan bantuan dana yang berasal dari sumbangan orang tua yang</p>		<p>dan inovatif” yang dalam hal ini tidak bersifat pemaksaan yang tergolong pungutan liar.</p>
--	--	--	--

	<p>dimana kami tidak menentukan berapa banyaknya mereka hanya membantu seikhlasnya saja untuk sekolah.</p> <p>KUS, F1.D2.d2.P3</p> <p>Komite hanya melihat dan memeriksa laporan kepala sekolah terkait RAPBS nya kemudian jikalau ada yang tidak sesuai itulah yang akan dimintai pertanggung jawaban kepala sekolah untuk diberikan penjelasan kepada orang tua siswa dan dewan guru.</p> <p>SH, F1.D2.d2.P3</p> <p>Peran kontrolnya komite dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah disini komite sekolah bertindak mengawasi bagaimana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah apakah sesuai dengan yang telah dilaporkan dan ditanda tangani oleh komite walaupun ada masalah kekurangan dan lain hal itu kita tetap musyawarakan bersama mencari jalan terbaik supaya dapat tertutupi lalu secara terbuka kita sampaikan kepada orang tua siswa bahwasanya ada hal-hal yang seperti ini disekolah.</p> <p>AM, F1.D2.d2.P3</p> <p>Tujuan dari hadirnya komite adalah</p>		
--	--	--	--

	<p>sebagai dewan pertimbangan jadi sekolah memanfaatkan hal tersebut agar komite tetap aktif dan membantu sekolah jadi pada dasarnya kami selalu mengundang komite setiap diadakan pertemuan termasuk mendiskusikan tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Sekolah disini telah merumuskan segala sesuatunya setelah itu barulah diadakan musyawarah terkait hal tersebut bersama komite dan guru-guru.</p> <p>K, F1.D2.d2.P3</p> <p>Transparansi sekolah terkait rencana anggaran pendapatan belanja sekolah saya rasa sudah cukup bagus, yang dimana ada pelaporan dari pihak sekolah terutama untuk ketua komite jadi komite tetap dilibatkan dalam memusyawarahkan hal tersebut seperti kemarin juga pada saat ada sumbangan sukarela dari orang tua siswa untuk membantu dalam pengadaan sarana UNBK, kita kan dituntut oleh pemerintah untuk memfasilitasi siswa dalam hal ini yang dimaksudkan pihak sekolah harus menyiapkan kebutuhan seperti laptop yang memang masih minim jadi semuanya saling merangkul untuk</p>		
--	--	--	--

	memberikan sumbangsinya agar bagaimana sekolah dapat menambah sedikit demi sedikit sarana tersebut dengan dibantu oleh orang tua siswa melalui komite.		
--	--	--	--

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI



Foto Wawancara Ketua Komite



Foto Wawancara Sekretaris Komite



Foto Wawancara Anggota Komite



Foto Wawancara Kepala Sekolah



Foto Wawancara Wakil Ketua Komite



Foto Gerbang Sekolah SMP Negeri 33 Makassar



Foto Visi & Misi SMP Negeri 33 Makassar



Foto Motto SMP Negeri 33 Makassar



Foto Gedung Kelas SMP Negeri 33 Makassar



Foto Pelaksanaan Program Adiwiyata di SMP Negeri 33 Makassar

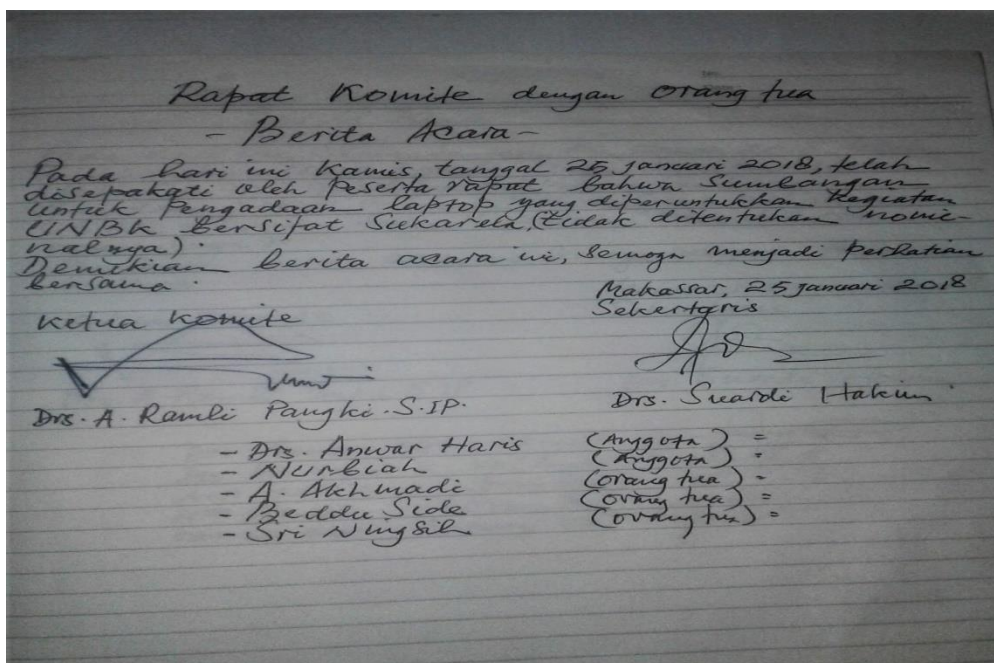


Foto Berita Acara Rapat Komite dengan Orang Tua Siswa

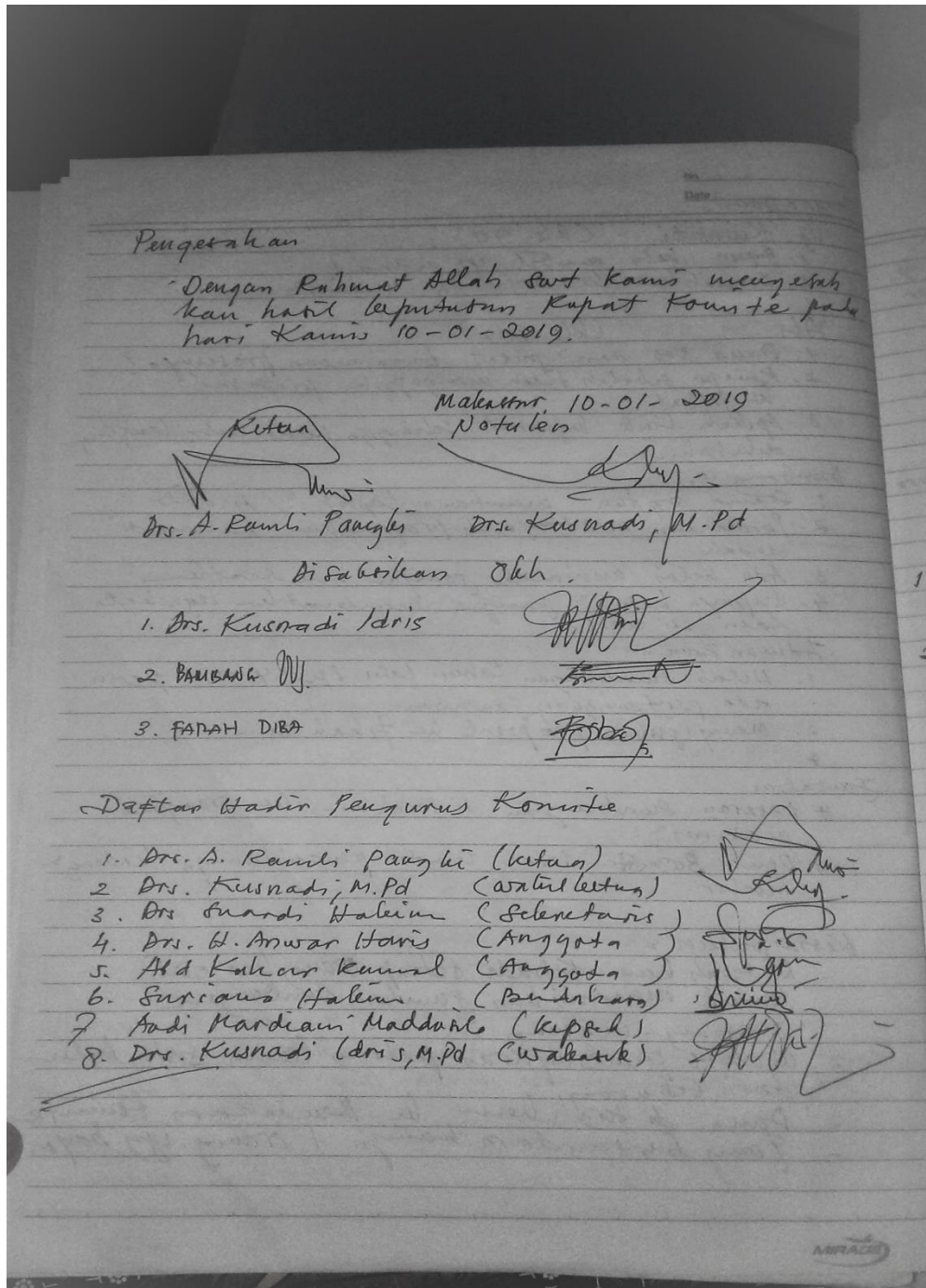


Foto Pengesahan Hasil Rapat Komite dengan Orang Tua Siswa

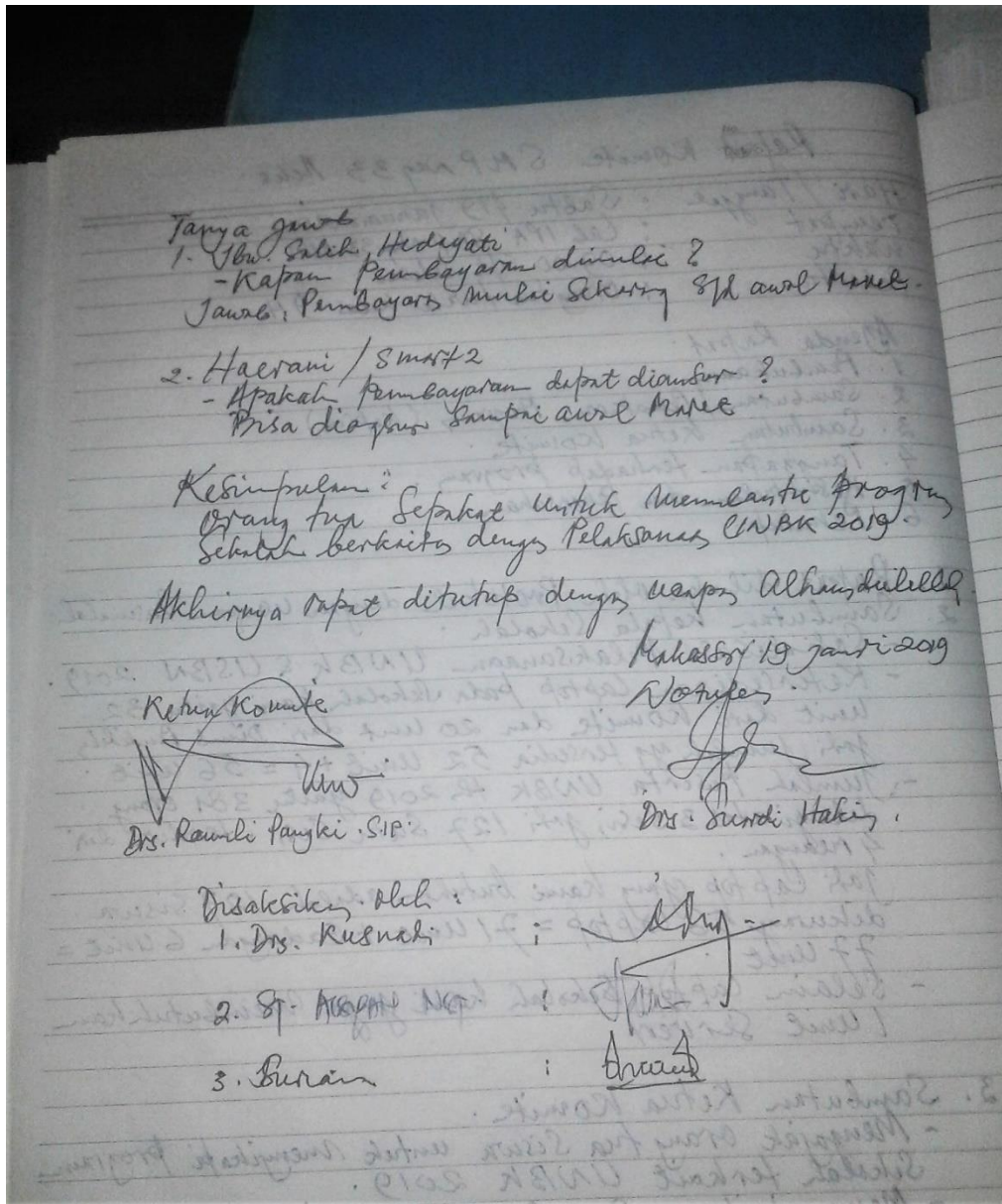


Foto Hasil Notulen Rapat Komite Sekolah

Daftar Hadir Pengurus Komite
Jumat 19 Januari 2018.

NO	Nama	Alamat	No. HP	TTD.
1	A. Ramlis Pangli	NTI	0821 8933 0054	M.
2	Drs. Anwar. Haris	PHP Blok P, No 5	0821 821 4445	Ok
3	Drs. ABD. FAHAR K, M.H	BTS K. UPA B6/9	0853 9224 110	U
4	Drs. Kusnadi, M. Pd	Jl. N. p. a. 6, G1	085 255 002 069	S
5	Drs. Suardi Hakim	Jl. Bonto Cinde 18	081 354 876 447	S
6	SURIANA HAKIMI, S.Sos.	Jl. Teling 93/1/104	085 242 051 104	M.
7	NURBIAH	Jl. MPTAMS	085 20999 0226	M.
8	Eddy. SE.	Jl. Pasiranda perum. Angin mahmud block 7/10	08124 258616	S
9				
10				

Foto Daftar Hadir Rapat Komite Sekolah

Absen Pengurus Komite

1. Drs. A. Ramlis Pangli (Ketua)
2. Drs. Kusnadi, M. Pd (Wakil)
3. Drs. H. Anwar Haris (Anggota)
4. Andi Mardiansyah Mardiansyah (Kasubb)
5. Drs. Kusnadi Idris (Wakil)

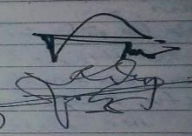
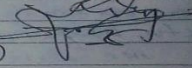



Foto Absen Pengurus Komite Sekolah

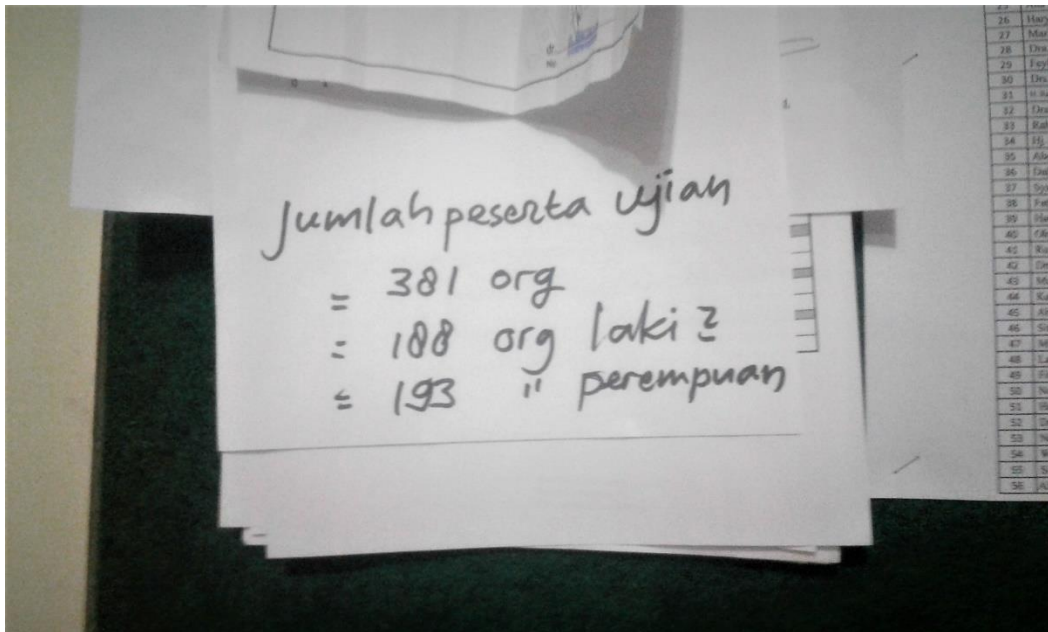


Foto Jumlah Peserta UNBK Tahun 2019 SMP Negeri 33 Makassar



Foto Salah Satu Juara Event Yang Di ikuti Guru SMP Negeri 33 Makassar



Foto Struktur Organisasi SMP Negeri 33 Makassar

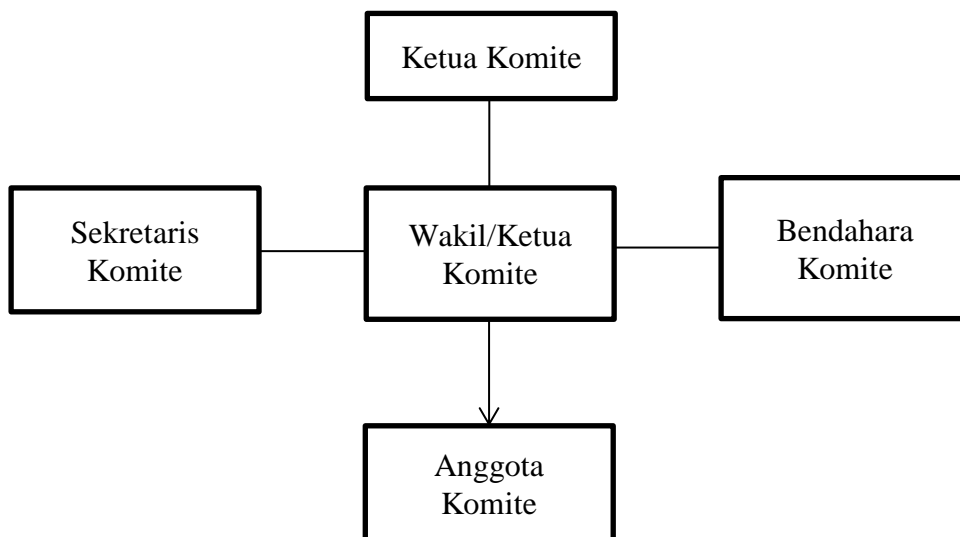


Foto Struktur Kepengurusan Komite Sekolah SMP Negeri 33 Makassar

PROFIL SEKOLAH

8. Nama Sekolah : SMP Negeri 33 Makassar
 Alamat Sekolah : Jl. Tamalate VIII No.1 Perumnas Makassar
 Telepon / Fax : (0411) 869885 / 0411869885
9. Nama Kepala Sekolah : ANDI MARDIANI MADDUSILA, S.Pd., M.Pd
 Nomor HP : 082138998300
10. Kategori Sekolah : Mandiri
11. Tahun Didirikan / Tahun Beroperasi : 1992 / 1994
12. Kepemilikan Tanah / Bangunan : Milik Pemerintah
 c. Luas Tanah / Status : 5000 M² / SHM
 d. Luas Bangunan : 3.151 M²
13. No. Rekening Rutin Sekolah : 0050-01-103099-50-1,
 Atas Nama Bend.Rutin SMPN 33 Makassar

Foto Profil SMP Negeri 33 Makassar

14. Data siswa 3 (tiga) tahun terakhir :

Th. Pelajaran	Jml Pendaftar (CLN Siswa Baru)	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah (Kls. VII+ VIII+IX)	
		JML Siswa	JML Rombel	JML Siswa	JML Rombel	JML Siswa	JML Rombel	JML Siswa	JML Rombel
2016 / 2017	687 Orang	396	11	304	9	341	10	1041	30
2017 / 2018	425 Orang	251	7	382	11	304	9	936	27
2018 / 2019	563 Orang	360	7	251	11	378	11	989	28

8. (a). Data Ruang Kelas

Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Asli				Jumlah Ruang lain yang digunakan untuk kelas (e)	Jumlah Ruang yang digunakan untuk Ruang kelas F=(d+e)
	Ukuran 7x9 m ² (a)	Ukuran <63 m ² (b)	Ukuran <63 m ² (c)	Ukuran (d) =(a+b+c)		
		27	-	-	27 Ruang	-

Foto Data Siswa dan Data Ruang Kelas

(b). Data Ruang Lain

	Jenis Ruangan	JML (Buah)	Ukuran (m ²)	Keterangan
1	Kepala Sekolah	1	10 x 6	
2	Wakil Kepala Sekolah	-	-	
3	Guru	1	12 x 7	
4	Pegawai / TU	1	10 x 6	
5	Perpustakaan	1	12 x 7	
6	Laboratorium IPA	1	15 x 8	
7	Laboratorium Komputer	1	9 x 7	
8	OSIS	1	3,4 x 6,4	
9	BP / BK	1	9 x 7	
10	UKS	1	5 x 12	
11	Mushallah	1	84 m ²	
12	Pramuka	1	4 x 7	
13	PMR	1	3 x 9	
14	WC Siswa	10	10x1,5	
15	WC Guru / Pegawai	4	2x1,5	
16	Gudang	1	2,5 x 5	
17	Rumah Bujang	1	4x3	
18	Lap. Parkir	1	7x6	
19	Prakarya	1	2,5 x 4,7	
20	Kurikulum	1	2,6 x 6	

9. Data Guru / Staf

Guru / Staf	Jumlah	Keterangan
Guru Tetap (PNS)	50 Orang	
Guru Honor Sekolah	6 Orang	
Staf Tata Usaha	3 Orang	
Staf Honor Sekolah	10 Orang	

Makassar, 29 Desember 2018
Kepala SMP Negeri 33 Makassar,

ANDI MARDIANI MADDUSILA, S.Pd., M.Pd
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 196501121989032011

Foto Data Ruang Kelas dan Data Guru/Staf di SMP Negeri 33 Makassar

**P
E
R
S
U
R
A
T
A
N**

LAMPIRAN 5



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat :Jalan Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222

Telepon: 884457, Fax. (0411) 863076

Laman: www.fip.unm.ac.id; E-mail: fip@unm.ac.id

Nomor :1705/UN.36.4/LT/2018
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

16 April 2018

Yth :1. Drs. M. Bachtiar, M.Si
2. Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd

Berdasarkan surat usulan Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, Nomor : 054/UN.36.4.3/KM/2018, tanggal 13 April 2018, tentang pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa Program Sarjana (S1), kami menugaskan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	NIM	Jur/Prodi	Judul Skripsi
Hesti Nurlita	1543040014	Administrasi Pendidikan	<i>Peran Kepala Sekolah dalam Penerapan Inovasi Program Pemanfaatan Pembelajaran elearning di SDN Kompleks IKIP Ujung Pandang</i>

Harapan kami semoga pembimbingan ini dapat terlaksana dengan baik dan selesai pada waktu yang telah ditentukan.

Pembantu Dekan Bid. Akademik



Dr. Abdul Samad, M.Si, Kons
NIP.197103172002121001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dengan judul: "Kontribusi Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 33 Makassar)" Atas Nama:

Nama : Hesti Nurlita
NIM : 1543040014
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan, maka layak untuk di ujikan dalam seminar proposal.

Makassar, 06 Februari 2019

Pembimbing I;

Drs. M. Bachtiar, M.Si
NIP. 19561231 198503 1 014

Pembimbing II;

Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd
NIP. 19831202 201012 1 008

Disahkan oleh :
Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan



Dr. Ansar, M. Si.
NIP. 19690729 200312 1 004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan: Tamalate 1 Tidung, Makassar KP. 90222
Telepon: 884457, Fax. (0411) 884457
Laman: www.fip.unm.ac.id; E-mail: fip@unm.ac.id

Nomor : 020/Pan-Seminar/2019
Lamp. : 1 (satu) Exemplar
Hal : *Undangan Seminar Proposal*

Yth. : 1. Dr. Ansar, M.Si (Ketua Ujian)
2. Drs. M. Bachtiar, M.Si (Pembimbing 1)
3. Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd. (Pembimbing 2)
4. Muh. Ardiansyah, S.IP, M.Pd (Penanggap 1)
5. Andi Wahed, S.Pd, M.Pd. (Penanggap 2)
di Makassar

Dengan hormat, mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk bertindak sebagai penguji/panitia seminar proposal usulan penelitian dari:

Nama Mahasiswa : HESTI NURLITA
Nomor Pokok : 1543040014
Program Studi : ADMINISTRASI PENDIDIKAN - (S1)
Pembimbing : 1. Drs. M. Bachtiar, M.Si
2. Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd.

dengan judul Penelitian:

"Kontribusi Peran Controlling Agency Komite Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 33 Makassar)"

Yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Februari 2019
Pukul : 13.00 - 14.30 WITA
Tempat : Ruang Dosen Jurusan AP FIP UNM

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Makassar, 14 Februari 2019
Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan,

Dr. H. Ansar, M.Si.
NIP 196907292003121004

Printed on : 15/02/2019 13:38:11

PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pembahas utama dan para peserta seminar yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019, maka usulan penelitian untuk skripsi saudara(i) dibawah ini :

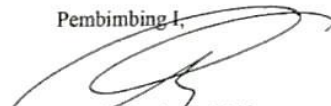
Nama : Hesti Nurlita
NIM : 154 3040014
Program Studi/Jurusan : Administrasi Pendidikan
Judul : Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah di SMP Negeri 33 Makassar

Telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan sesuai usulan/saran pembahas utama dan peserta seminar. maka usulan penelitian untuk skripsi saudara diperkenankan meneruskan kegiatan pada tahap selanjutnya.

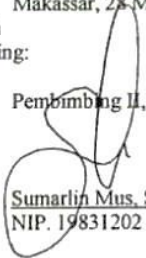
Makassar, 28 Maret 2019

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing:

Pembimbing I,

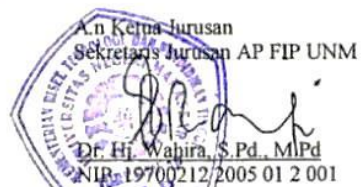

Drs. M. Bachjar, M.Si
NIP. 19561231 198503 1 001

Pembimbing II,


Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd
NIP. 19831202 201012 1 008

Disahkan:


A.n. Dekan
PD I FIP UNM
Dr. Mustafa, M.Si
NIP. 19660525 199203 1 002


A.n. Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan AP FIP UNM
Dr. Hi. Wahira, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700212/2005 01 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222

Telepon: 884457, Fax. (0411) 884457

Laman: www.fip.unm.ac.id; E-mail: fip@unm.ac.id

Nomor : 3549/UN36.4/LT/2019

09 April 2019

Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Yth : Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sulawesi Selatan

Di –
Makassar

Sehubungan, dengan penyelesaian studi mahasiswa Program Strata Satu (S-1), maka terlebih dahulu harus melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi. Untuk itu kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Hesti Nurlita
NIM : 1543040014
Jurusan/ P.odi : Administrasi Pendidikan
Judul Skripsi : *Peran Controlling Agency Komite Sekolah di SMF Negeri 33 Makassar*

Diberikan izin untuk melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang ada dalam wilayah Lembaga/ Instansi/ Organisasi yang Bapak/ Ibu Pimpin.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Mustafa, M.Si
NIP 196605251992031002

Dr. Mustafa, M.Si

NIP 196605251992031002

Tembusan:

1. Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14322/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Pembantu Dekan Bid. Akademik FIP UNM Makassar Nomor : 2549/UN36.4/LT/2019 tanggal 09 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : HESTI NURLITA
Nomor Pokok : 1543040014
Program Studi : Adm. Pendidikan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Tamalate I Tidung, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN CONTROLLING AGENCY KOMITE SEKOLAH DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 16 April s/d 16 Mei 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth:
1. Pembantu Dekan Bid. Akademik FIP UNM Makassar di Makassar,
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 15 April 2019

K e p a d a

Nomor : 070 / 1107 -I/BKBP/IV/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 14322/S.01/PTSP/2019 Tanggal 11 April 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : HESTI NURLITA
Nim/Jurusan : 1543040014 / Adm. Pendidikan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNM
Alamat : Jl. Tamalate I Tidung, Makassar
Judul : *"PERAN CONTROLLING AGENCY KOMITE SEKOLAH DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR "*

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **16 April s/d 16 Mei 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



An. WALIKOTA MAKASSAR
PIL. KEPALA BADAN

Drs. AKHMAD NAMSUM, M.M.

Pangkat : Pembina
NIP : 196705242006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Pembantu Dekan Bid. Akademik FIP UNM di Makassar;
4. *Mahasiswa yang bersangkutan;*
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letjen Hertasning No. 8 Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222
Website: http://www.dikbud_makassar.info : e-mail: dikbud.makassar@yahoo.com



IZIN PENELITIAN NOMOR : 070/0188/DP/IV/2019

Dasar : Surat Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar
Nomor : 070/1107-II/BKBP/IV/2019 Tanggal 15 April 2019
Maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar :

MEN GIZINKAN

Kepada

Nama : HESTI NURLITA
NIM / Jurusan : 1543040014/ Adm. Pendidikan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Tamalate 1 Tidung , Makassar

Untuk

: Mengadakan *Penelitian* di *SMP Negeri 33 Kota Makassar* dalam rangka
Penyusunan Skripsi di *UNM* dengan judul penelitian:

**"PERAN CONTROLLING AGENCY KOMITE SEKOLAH DI SMP
NEGERI 33 KOTA MAKASSAR"**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus melapor pada Kepala Sekolah yang bersangkutan
2. Tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah
3. Harus mematuhi tata tertib dan peraturan di Sekolah yang berlaku
4. Hasil penelitian 1 (satu) exemplar di laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

Demikian izin penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 16 April 2019

An. KEPALA DINAS
Sekretaris
ub
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



A. SITI DJUNHARIJAH, SE
Pang. Ret. : Penaja Tk. I
NPP : 19700109 199403 2 004



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 33 MAKASSAR




Jl. Tamalate 8 No.1 Perumnas Panakkukang, 90222 Telp.(0411) 869885

NSS : 20.119.600.9208

NPSN : 40311918

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	: Dinas Pendidikan
Diterima Tanggal	: 29 / 09 / 2019
Hal Surat	: 1200 Penelitian
Tanggal Surat	: 16 / 09 / 2019
Nomor Agenda	: 090
Nomor Surat	: 070 / 0180 / 0p / IV / 2019
Diteruskan Kepada	:
ISI DISPOSISI	:
<p>Yth: Kesnadi tolong di bantu.</p> 	

Catatan :



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 33 MAKASSAR



Jl. Tamalate 8 No.1 Perumnas Panakfukang, 90222 Telp.(0411) 869885 Fax 0411-869885

NSS : 20.119.600.9208

NPSN : 40311918

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 421/114/SMP.33/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SMP Negeri 33 Makassar menerangkan bahwa :

Nama : HESTI NURLITA
N I M : 1543040014
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNM
Jurusan : Administrasi Pendidikan

Benar telah melaksanakan kegiatan penelitian pada SMP Negeri 33 Makassar dalam rangka penyusunan Skripsinya yang berjudul :

“ Peran Controlling Agency Komite Sekolah Di SMP Negeri 33 Makassar “

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 Juni 2019

Kepala SMP Negeri 33 Makassar,



Andi Mardiani Maddusila, S.Pd.,M.Pd
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 196501121989032011



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Jalan : Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222
Telepon : 884457, Fax. (0411) 884457
Laman: www.fip.unm.ac.id; E-mail: fip@unm.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hasil Penelitian dengan judul "PERAN *CONTROLLING AGENCY* KOMITE SEKOLAH DI SMP NEGERI 33 MAKASSAR"

Nama : HESTI NURLITA
NIM : 154 304 0014
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diteliti, naskah hasil penelitian ini telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.

Makassar, 03 Juli 2019

Pembimbing I;

Drs. M. Bachtier, M.Si
NIP. 19561231 198503 1 001

Pembimbing II;

Sumarliah Mus, S.Pd, M.Pd
NIP. 19831202 201012 1 008

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan

Dr. Ed. Faridah, S.T., M.Sc
NIP. 19740224 200501 2 002

RIWAYAT HIDUP



Hesti Nurlita, lahir di Kalase'rena Kabupaten Gowa pada tanggal 10 Desember 1996 dan sampai saat ini berusia 22 tahun status belum menikah. Merupakan anak kedua, dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Bakri dan Ibu Hamsina. Riwayat pendidikan peneliti, dimulai dari jenjang pendidikan di Sekolah Dasar pada tahun 2002 di SD Inpres Pabbentengang dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun itu juga, peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bajeng dan tamat pada tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 1 Limbung (SMK Negeri 1 Gowa) dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Di tahun yang sama yaitu 2015 penulis melanjutkan studi strata satu yang lulus melalui jalur pendaftaran SNMPTN pada program studi Jurusan Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Makassar.